



Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat

LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

TAHUN 2025



E3ABAE3288

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>

Kata Pengantar

Bismillaahirrahmaanirrahiim
Assalamualalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah swt, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus sebagai implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan.

Sepanjang tahun 2025, Sekretariat Daerah telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang diarahkan untuk memperkuat fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan terhadap perangkat daerah, serta mendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis pemerintah daerah. Capaian kinerja yang disajikan dalam laporan ini merupakan hasil dari upaya bersama seluruh jajaran Sekretariat Daerah dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan.

Kinerja Sekretariat Daerah pada hakikatnya merupakan bagian penting dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Jawa Barat melalui penguatan koordinasi kebijakan, peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan, serta penguatan sinergi antar perangkat daerah. Oleh karena itu, LKIP ini diharapkan tidak hanya menjadi media pertanggungjawaban kinerja, tetapi juga menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran untuk terus meningkatkan kinerja kelembagaan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada hasil pembangunan bagi masyarakat Jawa Barat. Demikian, terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandung, 27 Februari 2026
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si
Pembina Utama



E3ABAE3288

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>

Daftar Isi

Pendahuluan

Latar Belakang	02
Maksud dan Tujuan	03
Tugas Pokok dan Fungsi	04
Proses Bisnis	06
Isu Strategis	08
Tindak Lanjut LHE SAKIP Sekretariat Daerah Tahun 2025	11

Perencanaan Kinerja

17	Rencana Strategis Tahun 2025-2029
20	Perjanjian Kinerja Tahun 2025
22	Rencana Anggaran Tahun 2025

Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja	26
Sasaran 1 Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pendidikan Tinggi	30
Sasaran 2 Terkendalinya Stabilitas Harga Daerah Jawa Barat	34
Sasaran 3 Meningkatnya Kinerja BUMD	38
Sasaran 4 Regulasi Daerah Adaptif	42
Sasaran 5 Meningkatnya Efektivitas Dukungan Kebijakan terhadap Pembangunan	46
Sasaran 6 Kinerja Perangkat Daerah Mencapai Target	56
Sasaran 7 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	60
Sasaran 8 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Jawa Barat	63
Sasaran 9 Kelembagaan Agile	68



E3ABAE3288

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>

Sasaran 10 Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi	72
Sasaran 11 Pelaporan Kinerja Pemda Berdampak pada Akselerasi Kinerja Pembangunan	77
Sasaran 12 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Realiasi Anggaran	81

Penutup

91

Lampiran

93



E3ABAE3288

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>

01

PENDAHULUAN



E3ABAE3288

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>

Latar Belakang

Sekretariat Daerah sebagai salah satu unit pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menetapkan sasaran kinerja dan indikator untuk mendukung pencapaian visi Jawa Barat Istimewa: Lembur Diurus, Kota Ditata. Sasaran kinerja, indikator, berikut target ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang merujuk kepada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 serta mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKOD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Disamping itu, sasaran kinerja, indikator, dan target diperjanjikan dalam perjanjian kinerja secara berjenjang untuk memastikan pencapaiannya secara akuntabel.

Sejalan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap instansi pemerintah dan unit kerja memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan melalui penyusunan laporan kinerja. Oleh karena itu, Sekretariat Daerah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan rencana kerja dan capaian kinerja yang telah dicapai selama tahun berjalan. Laporan ini memuat informasi mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis, analisis atas capaian indikator kinerja, serta berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.



E3ABAE3288

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>

Maksud & Tujuan

Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Daerah selama tahun 2025 kepada para pemangku kepentingan.

Tujuan

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Tahun 2025:

1. Sebagai gambaran keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
2. Penjelasan pelaksanaan program dan kegiatan
3. Efisiensi penggunaan anggaran yang telah dilakukan oleh instansi pemerintah.



Gambaran Umum Sekretariat Daerah

Tugas Pokok dan Fungsi

Pengaturan pekerjaan, wewenang, dan tanggung jawab agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif tergambar dalam struktur organisasi. Adapun struktur organisasi Sekretariat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. Sedangkan tugas pokok, fungsi, serta rincian tugasnya didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan peraturan tersebut, Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok “merumuskan kebijakan umum Pemerintah Daerah Provinsi dan pengoordinasian administratif, membina, mengendalikan dan memfasilitasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah provinsi serta pelayanan administratif”. Adapun fungsi Sekretariat Daerah yaitu:

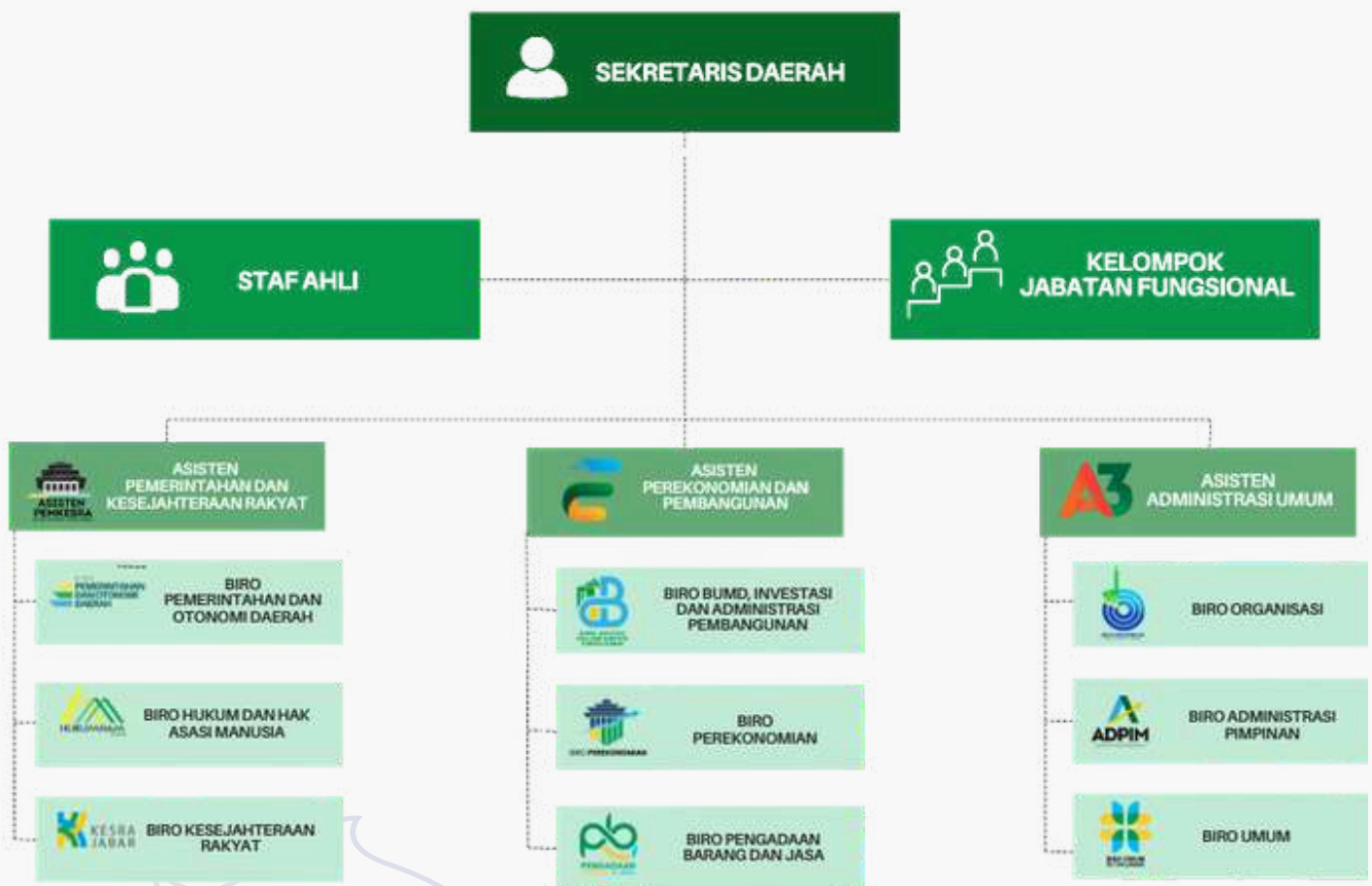
1. penyelenggaraan perumusan, monitoring dan evaluasi kebijakan umum Pemerintah Daerah Provinsi;
2. penyelenggaraan koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah provinsi oleh perangkat daerah;
3. penyelenggaraan administrasi Sekretariat Daerah Provinsi;
4. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah Provinsi; dan
5. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, Sekretaris Daerah dibantu oleh tiga Asisten, sembilan biro, kelompok jabatan fungsional, dan kelompok jabatan pelaksana. Asisten Sekretaris Daerah memiliki tugas dalam “merumuskan, memonitor, dan mengevaluasi kebijakan umum bidang pemerintahan dan otonomi daerah, hukum dan hak asasi manusia, kesejahteraan rakyat, perekonomian, badan usaha milik daerah, investasi, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa, organisasi, administrasi pimpinan,



dan umum, serta kebijakan strategis program, kegiatan, atau pekerjaan unggulan provinsi, melakukan koordinasi supervisi, pembinaan, dan pengendalian untuk memandu dan menyinergikan implementasinya oleh biro dan perangkat daerah dalam lingkup tugasnya". Sedangkan biro memiliki tugas "memimpin, mengoordinasikan, dan menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah provinsi, serta pelayanan administratif, melaksanakan tugas dekonsentrasi serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya". Disamping itu, Sekretaris Daerah juga mengoordinir tugas pokok dan fungsi pada Staf Ahli dalam mendukung pelaksanaan tugas gubernur.

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

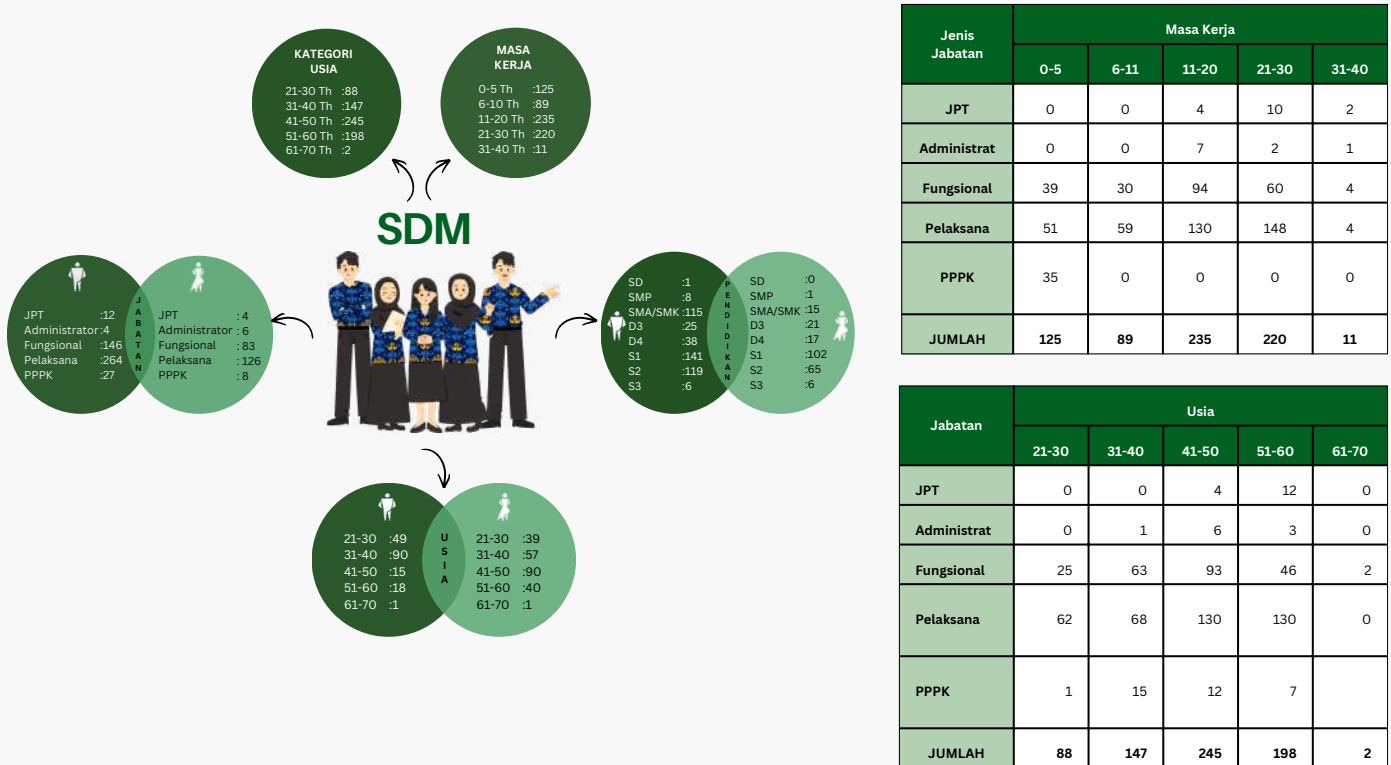


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>

Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat didukung oleh sumber daya manusia (SDM), baik secara kualitas maupun kuantitas yang bertindak sebagai pelaksana, pengelola serta penggerak utama seluruh aktivitas pada Sekretariat Daerah. SDM yang berkualitas dapat menggerakkan sumber daya lain agar berjalan dengan baik sehingga target organisasi lebih mudah tercapai. Berdasarkan data bulan Februari tahun 2025, Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat berjumlah 680 (enam ratus delapan puluh) orang dengan mayoritas atau sebanyak 66,62% berjenis kelamin laki-laki, sebanyak 36,03% berusia 41-50 tahun, sebanyak 62,50% menduduki jabatan pelaksana, dan sebanyak 35,73% memiliki kualifikasi pendidikan S1 (sarjana). Adapun komposisi pegawai berdasarkan kriteria diuraikan sebagai berikut:

Diagram Profil ASN Sekretariat Daerah



Jenis Jabatan	Pendidikan									
	SD	SMP	SMA/SM	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3
JPT	0	0	0	0	0	0	0	0	13	3
Administrator	0	0	0	0	0	0	0	1	7	2
Fungsional	0	0	0	0	0	4	19	90	111	5
Pelaksana	0	10	116	0	0	36	35	138	53	2
PPPK	0	0	14	0	0	6	1	14	0	0
JUMLAH	0	10	130	0	0	46	55	243	184	12



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>

Isu Strategis

Pada tahun 2025, Sekretariat Daerah menghadapi sejumlah isu strategis yang bersifat dinamis, baik karena faktor eksternal seperti kebijakan pusat dan transisi kepemimpinan daerah, maupun internal seperti peningkatan tata kelola pemerintahan daerah khususnya penguatan kebijakan berbasis bukti, penguatan koordinasi lintas sektor, penguatan reformasi birokrasi tematik, peningkatan kualitas SDM, dan pemanfaatan teknologi informasi. Berikut ini isu-isu penting yang menjadi perhatian pada penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah tahun 2025:

A. Transisi Pemerintahan dan Awal Penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029

Masa transisi pasca Pilkada Serentak Tahun 2024 mengharuskan penyesuaian cepat terhadap arah kebijakan baru yang diusung oleh kepala daerah terpilih. Penyusunan awal RPJMD 2025–2029 menjadi tahapan strategis dalam menentukan prioritas pembangunan lima tahun ke depan. Tantangannya meliputi keterbatasan waktu penyusunan, kebutuhan konsolidasi visi-misi dengan dokumen perencanaan, serta pentingnya menjaga kesinambungan program strategis yang telah berjalan agar tidak terjadi disrupsi tata kelola.

B. Dampak Implementasi UU HKPD Terhadap Fiskal Daerah

Pelaksanaan penuh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) mulai memberikan dampak nyata terhadap struktur dan pengelolaan fiskal daerah di tahun 2025. Penyesuaian dalam mekanisme transfer ke daerah, termasuk perubahan skema Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, menimbulkan keterbatasan ruang fiskal bagi daerah. Kondisi ini menuntut strategi penyesuaian pembiayaan, efisiensi belanja, dan perencanaan program yang semakin selektif dan berbasis hasil.

C. Perubahan Struktur APBD dan Penajaman Prioritas

Struktur APBD tahun 2025 mengalami penyesuaian sebagai dampak dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mendorong realokasi anggaran untuk percepatan program prioritas nasional. Di sisi lain, arah kebijakan kepala daerah terpilih membawa fokus baru yang lebih langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Penajaman prioritas program dan kegiatan menjadi keniscayaan, dengan tetap menjaga keseimbangan antara keberlanjutan program dan perumusan kebijakan berbasis bukti.



D. Penguatan Kebijakan Berbasis Bukti

Meskipun proses perumusan kebijakan berjalan secara reguler, pendekatan berbasis data dan bukti (evidence-based policy) masih belum menjadi praktik baku di seluruh perangkat daerah. Seringkali, kebijakan disusun tanpa analisis data yang memadai atau tidak diiringi dengan evaluasi mendalam terhadap hasil dan dampaknya. Hal tersebut menyebabkan potensi deviasi antara kebijakan dan kebutuhan riil masyarakat. Standarisasi penggunaan data dalam seluruh siklus kebijakan perlu diperkuat agar pengambilan keputusan lebih akurat dan berdaya guna.

E. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor

Kebijakan dan program strategis daerah kerap kali bersifat lintas sektor dan membutuhkan sinergi lintas perangkat daerah. Namun dalam praktiknya, koordinasi seringkali masih bersifat sektoral, parsial, dan belum terstruktur dengan baik. Kurangnya platform koordinasi terpadu dan lemahnya mekanisme pemantauan bersama menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program prioritas. Akibatnya, tumpang tindih program dan inefisiensi sumber daya masih sering terjadi.

F. Penguatan Reformasi Birokrasi Tematik

Mulai tahun 2025, reformasi birokrasi nasional bertransformasi ke arah yang lebih tematik dan berbasis hasil (outcome-based bureaucracy). Fokus diarahkan pada pencapaian dampak nyata bagi masyarakat dengan beberapa bidang prioritas seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi pelayanan, dan percepatan prioritas presiden. Pelaksanaan RB Tematik bertujuan untuk mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga dapat mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional. Sekretariat Daerah yang memiliki fungsi koordinasi lintas perangkat daerah dituntut tidak hanya sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai penggerak utama transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada hasil.

G. Pengembangan Tata Kelola yang Lebih Merata dan Berkelanjutan

Secara internal, implementasi reformasi birokrasi belum terjadi secara merata di seluruh unit kerja Setda. Beberapa unit telah melakukan perbaikan tata kelola, namun sebagian lainnya masih berjalan secara konvensional. Pembangunan Zona Integritas pun belum menunjukkan perkembangan signifikan, yang mencerminkan belum tertanamnya nilai-nilai akuntabilitas, integritas, dan pelayanan prima sebagai budaya kerja yang menyeluruh. Hal tersebut berisiko menghambat upaya peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.



E. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor

Kebijakan dan program strategis daerah kerap kali bersifat lintas sektor dan membutuhkan sinergi lintas perangkat daerah. Namun dalam praktiknya, koordinasi seringkali masih bersifat sektoral, parsial, dan belum terstruktur dengan baik. Kurangnya platform koordinasi terpadu dan lemahnya mekanisme pemantauan bersama menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program prioritas. Akibatnya, tumpang tindih program dan inefisiensi sumber daya masih sering terjadi.

F. Penguatan Reformasi Birokrasi Tematik

Mulai tahun 2025, reformasi birokrasi nasional bertransformasi ke arah yang lebih tematik dan berbasis hasil (*outcome-based bureaucracy*). Fokus diarahkan pada pencapaian dampak nyata bagi masyarakat dengan beberapa bidang prioritas seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi pelayanan, dan percepatan prioritas presiden. Pelaksanaan RB Tematik bertujuan untuk mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga dapat mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional. Sekretariat Daerah yang memiliki fungsi koordinasi lintas perangkat daerah dituntut tidak hanya sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai penggerak utama transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada hasil.

G. Pengembangan Tata Kelola yang Lebih Merata dan Berkelanjutan

Secara internal, implementasi reformasi birokrasi belum terjadi secara merata di seluruh unit kerja Setda. Beberapa unit telah melakukan perbaikan tata kelola, namun sebagian lainnya masih berjalan secara konvensional. Pembangunan Zona Integritas pun belum menunjukkan perkembangan signifikan, yang mencerminkan belum tertanamnya nilai-nilai akuntabilitas, integritas, dan pelayanan prima sebagai budaya kerja yang menyeluruh. Hal tersebut berisiko menghambat upaya peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

H. Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan SDM secara Strategis

Pengelolaan sumber daya manusia belum sepenuhnya diarahkan secara strategis untuk mendukung pencapaian prioritas organisasi. Pola rekrutmen, rotasi, serta pengembangan kompetensi belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebutuhan aktual dan tantangan masa depan. Ketimpangan kapasitas antar unit dan kurangnya pengembangan kompetensi tematik—seperti digitalisasi, kolaborasi lintas sektor, atau analisis kebijakan—menjadi tantangan serius dalam membangun organisasi yang tanggap dan adaptif.



I. Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai Enabler Efisiensi

Transformasi digital di lingkungan Setda memang telah berjalan. Namun, belum sepenuhnya terarah dan terintegrasi. Banyak sistem informasi yang berjalan secara silo (terpisah), tidak saling terhubung, dan belum dimanfaatkan secara maksimal dalam mendukung proses bisnis organisasi. Padahal, digitalisasi bukan sekadar otomasi, melainkan peluang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kecepatan pengambilan keputusan.

J. Pengembangan Kapasitas Adaptif terhadap Dinamika Strategis

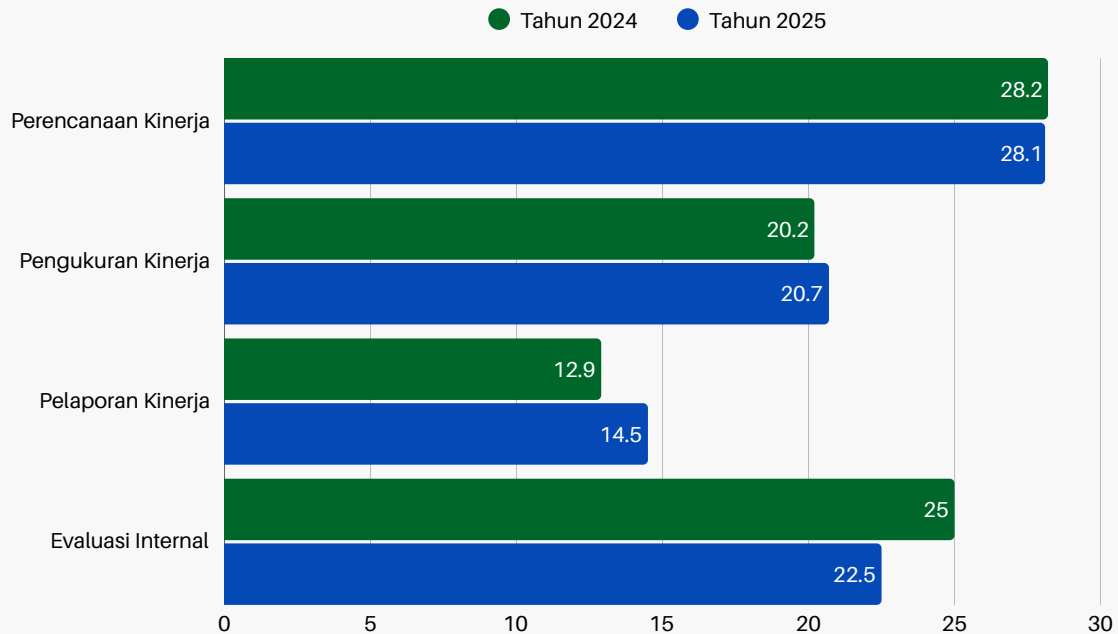
Perubahan regulasi pusat, dinamika sosial-ekonomi global, serta tantangan lintas isu seperti perubahan iklim dan disrupsi teknologi menuntut kapasitas organisasi yang lincah dan antisipatif. Saat ini, kapasitas tersebut belum sepenuhnya terbentuk di lingkungan Setda. Diperlukan mekanisme early warning, analisis kebijakan strategis, serta forum belajar yang memungkinkan organisasi terus memperbarui diri menghadapi perubahan.

Tindak Lanjut LHE SAKIP Setda Tahun 2025

Implementasi SAKIP pada Sekretariat Daerah meningkat. Lembar Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan nilai sebesar 0,50 poin dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya yaitu 86,80 poin di tahun 2025 dan 86,30 poin di tahun 2024. Secara lebih detail, peningkatan terjadi pada komponen pengukuran kinerja sebesar 1,50 poin yaitu dari nilai 20,20 poin di tahun 2024 menjadi 21,70 poin di tahun 2025. Selain itu, peningkatan juga terjadi pada komponen pelaporan kinerja sebesar 1,6 poin dari nilai 12,90 poin di tahun 2024 menjadi 14,50 di tahun 2025. Namun demikian, disamping adanya peningkatan secara komponen, terdapat pula penurunan nilai. Komponen perencanaan kinerja menurun 0,10 poin dari nilai 28,20 poin di tahun 2024 menjadi 28,10 poin di tahun 2025. Begitu juga pada komponen evaluasi internal yang menurun sebesar 2,50 poin dari nilai 25 poin di tahun 2024 menjadi 22,50 poin di tahun 2025.



Perbandingan Nilai SAKIP per Komponen pada Tahun 2024 dan 2025



Dari hasil penilaian, Inspektorat selaku evaluator implementasi SAKIP perangkat daerah memberikan tujuh rekomendasi untuk ditindaklanjuti pada perencanaan tahun 2026. Disamping dampaknya kepada efektivitas implementasi SAKIP internal, rekomendasi juga diberikan agar implementasi SAKIP pada Sekretariat Daerah memiliki dampak secara eksternal kepada perangkat daerah lain.

No	Rekomendasi LHE Tahun 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Link Bukti Dukung
1	Penyusunan dokumen perubahan rencana kerja tahun berjalan dan/atau rencana kerja tahun berikutnya memuat perbaikan rencana kerja sesuai cascading yang telah disusun	Memasukan analisis hasil evaluasi kinerja yang memuat perbaikan kinerja ke dalam Renja Perubahan atau Renja n+1 yang relevan dengan kondisi terkini	Renja Setda Tahun 2027 dan Renja Setda Perubahan Tahun 2026	Semester 1 dan 2 Tahun 2026	Sekda dan Kepala Biro	https://drive.google.com/drive/folders/1TugR4BV6KSUFxaK9XQDJWA2t3ZJtKI?usp=sharing



E3ABAE3288

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>

<p>2</p>	<p>Menyusun SOP pengumpulan kinerja dan pengukuran kinerja di tingkat eselon 1 dan eselon 2</p>	<p>Menyusun SOP pengumpulan kinerja dan pengukuran kinerja di tingkat eselon 1 dan eselon 2 yang diverifikasi oleh Biro Organisasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan</p>	<p>SOP Pengumpulan Kinerja dan SOP Pengukuran Kinerja</p>	<p>Triwulan 1 Tahun 2026</p>	<p>Sekda dan Kepala Biro</p>	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1TugR4BV6KSUFxaK9XQDJWA2t3ZJtKlKY?usp=sharing</p>
<p>3</p>	<p>Menyusun definisi operasional indikator kinerja program, kegiatan, sub kegiatan yang setidaknya-tidaknya memuat: 1.Konsep, definisi, dan interpretasi 2.Metode perhitungan 3.Sumber data 4.Ukuran dan satuan 5.Klasifikasi penyajian 6.Periode data</p>	<p>Menyusun buku metadata indikator kinerja level strategis, program, dan kegiatan.</p>	<p>Metadata Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029</p>	<p>Triwulan 4 Tahun 2025- Triwulan 1 Tahun 2026</p>	<p>Sekda dan Kepala Biro</p>	<p>https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FMJbzKax-efOX4_Hij7dufkmzO29AtnC/edit?usp=sharing&ouid=107587536907606775252&rtopof=true&sd=true</p>
<p>4</p>	<p>Menyusun kriteria perangkat daerah/biro</p>	<p>Menyusun kriteria perangkat perangkat daerah/biro sesuai indikator kinerja utama Sekretariat Daerah yang mensyaratkan adanya perangkat perangkat daerah. Kriteria akan dimasukkan ke dalam buku Metadata Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029</p>	<p>Metadata Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029</p>	<p>Triwulan 2 Tahun 2026</p>	<p>Sekda dan Kepala Biro</p>	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1TugR4BV6KSUFxaK9XQDJWA2t3ZJtKlKY?usp=sharing</p>



5	<p>Mengoptimalkan penggunaan aplikasi JAPATI antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengintegrasikan aplikasi SIPD dengan JAPATI untuk input anggaran 2. Menambahkan fitur lembar kerja pepadanan program, kegiatan, dan sub kegiatan 3. Mengintegrasikan aplikasi TRK dan JAPATI untuk pengukuran kinerja dan/atau aplikasi JAPATI dengan aplikasi eMonev 4. Melakukan pemutakhiran fitur pada capaian kinerja sub kegiatan dengan membandingkan antara target dengan realisasi 5. Menambah fitur tanda tangan elektronik pada pengukuran kinerja 6. Menggunakan akun Sekretariat Daerah untuk evaluasi SAKIP 7. Mempertimbangkan hasil pengukuran kinerja dalam penempatan/penghapusan jabatan dan kenaikan pangkat baik struktural maupun fungsional 8. Mempertimbangkan hasil pengukuran kinerja dalam penyesuaian organisasi. 	<p>Menyusun nota dinas kepada Biro Organisasi sebagai pengelola JAPATI yang berisikan arahan untuk melaksanakan rekomendasi dari Inspektorat sebagaimana tertuang dalam LHE</p>	<p>Nota Dinas penyampaian rekomendasi Inspektorat terhadap pemanfaatan JAPATI</p>	<p>Triwulan 1 Tahun 2026</p>	<p>Sekda dan Kepala Biro</p>	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1TugR4BV6KSUFxaK9XODJWA2t3ZJtKIKY?usp=sharing</p>
---	--	---	---	------------------------------	------------------------------	--



6	Melakukan analisa secara mendalam terhadap program-program yang dilaksanakan dalam mencapai sasaran kinerja dan mengukur program yang paling berdampak dalam mencapai sasaran kinerja. Uraian analisis program dimuat dalam faktor-faktor keberhasilan/kegagalan dalam mencapai sasaran dan target kinerja	Melakukan pengendalian terhadap capaian kinerja program untuk melihat progres capaian kinerja utama sehingga dapat diperoleh data dan informasi berkenaan dengan program mana yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian sasaran kinerja utama Sekretariat Daerah.	Laporan capaian kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2026	Triwulan 1-4 Tahun 2026	Sekda dan Kepala Biro	https://drive.google.com/drive/folders/1TugR4BV6KSUFxqK9XQDJWA2t3ZJtKlKY?usp=sharing
7	Melakukan analisis efektivitas dan efisiensi kinerja berdasarkan hasil implementasi rekomendasi LHE SAKIP.	Melakukan analisis efektivitas dan efisiensi kinerja yang dituangkan dalam laporan kinerja	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Tahun 2025	Triwulan 1 Tahun 2026	Sekda	https://drive.google.com/drive/folders/1TugR4BV6KSUFxqK9XQDJWA2t3ZJtKlKY?usp=sharing



E3ABAE3288

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>

02

PERENCANAAN KINERJA



E3ABAE3288

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Sekretariat Daerah menetapkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 yang memuat Indikator Utama Pembangunan (IUP) sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Merujuk dokumen tersebut, kinerja Sekretariat Daerah dijabarkan dari tiga sasaran pembangunan yaitu pertama, 'Terbentuknya Individu Berpengetahuan dan Berawawasan' yang merupakan salah satu kinerja untuk mencapai misi pembangunan ke 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul. Sasaran pembangunan kedua yaitu 'Terkendalinya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah' yang merupakan salah satu kinerja untuk mencapai misi pembangunan ke 2: Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif. Sasaran pembangunan ketiga yaitu 'Meningkatnya Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif' yang merupakan salah satu kinerja untuk mencapai misi pembangunan ke 4: Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance.

Penjabaran kinerja pembangunan tersebut di atas diterjemahkan ke dalam 12 belas sasaran dan indikator kinerja Sekretariat Daerah. Sasaran pertama 'Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pendidikan Tinggi' ditetapkan sebagai kontribusi Sekretariat Daerah dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan kebijakan pendidikan dan koordinasi lintas sektor. Sasaran kedua 'Terkendalinya Stabilitas Harga Daerah Jawa Barat' ditetapkan sebagai pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah dalam penguatan koordinasi pengendalian inflasi daerah. Sasaran ketiga 'Meningkatnya Kinerja BUMD' ditetapkan dengan tujuan meningkatkan kinerja dan kontribusi BUMD terhadap pembangunan daerah Jawa Barat. Sasaran keempat 'Regulasi Daerah Adaptif' ditetapkan untuk mendukung penguatan sistem regulasi daerah yang berkualitas, harmonis, dan berorientasi pada kepastian hukum. Sasaran kelima 'Meningkatnya Efektivitas Dukungan Kebijakan terhadap Pembangunan' ditetapkan untuk memperkuat proses perumusan kebijakan berbasis data dan bukti (evidence-based policy), koordinasi lintas perangkat daerah, serta penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi kebijakan umum pemerintah daerah.



E3ABAE3288

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>

Selanjutnya, sasaran keenam 'Kinerja Perangkat Daerah Mencapai Target' ditetapkan sebagai bagian dari penguatan pengendalian kinerja perangkat daerah untuk memastikan perangkat daerah mencapai target kinerja. Sasaran ketujuh 'Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa' ditetapkan sebagai bagian dari penguatan reformasi birokrasi dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sasaran kedelapan 'Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Jawa Barat' ditetapkan untuk penguatan sistem pelayanan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta optimalisasi tata kelola pelayanan publik pada setiap perangkat daerah. Sasaran kesembilan 'Kelembagaan Agile' ditetapkan untuk meningkatkan efektivitas struktur dan fungsi kelembagaan pemerintah daerah. Sasaran kesepuluh 'Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi' ditetapkan bagian dari penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan integritas organisasi. Sasaran kesebelas 'Pelaporan Kinerja Pemda Berdampak pada Akselerasi Kinerja Pembangunan' ditetapkan untuk semakin meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dari sisi pelaporan kinerja. Sasaran kedua belas 'Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi' ditetapkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh.



E3ABAE3288

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>

Cascading Rencana Strategis



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja Sekretariat Daerah tahun 2025 didasarkan pada Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 dengan target sebagaimana tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pendidikan Tinggi	Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	9,64 Persen
2	Terkendalinya Stabilitas Harga Daerah Jawa Barat	Tingkat Inflasi	3,3 - 3,8 Persen
3	Meningkatnya Kinerja BUMD	Persentase BUMD Sehat	78,37 Persen
4	Regulasi Daerah Adaptif	Indeks Reformasi Hukum	89,7 Poin
5	Meningkatnya Efektivitas Dukungan Kebijakan terhadap Pembangunan	Nilai Kualitas Kebijakan Daerah	76,66 Poin
6	Kinerja Perangkat Daerah Mencapai Target	Persentase Perangkat Daerah dengan Deviasi Kinerja => 0%	63,28 Persen
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	90,3 Poin



E3ABAE3288

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>

8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Jawa Barat	Indeks Pelayanan Publik	4,76 Poin
9	Kelembagaan Agile	Nilai Evaluasi Kelembagaan	68,45 Poin
10	Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah dengan IRB Kategori A	89 Persen
11	Pelaporan Kinerja Pemda Berdampak pada Akselerasi Kinerja Pembangunan	Nilai SAKIP Pemda Dimensi Pelaporan	13,58 Poin
12	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tinggi (Kategori), 3,6855



E3ABAE3288

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>

RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

Berdasarkan pagu anggaran perubahan tahun 2025, total pagu anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Sekretariat Daerah adalah sebesar Rp732.327.656.442,00. Dilihat dari alokasi per indikator kinerja, dukungan anggaran terbesar dialokasikan pada Indeks Pelayanan Publik dengan pagu sebesar Rp489.830.821.001,00 (66,88%).

Hal ini mencerminkan prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Selanjutnya alokasi anggaran yang signifikan juga diberikan untuk mendukung indikator Nilai Kualitas Kebijakan Daerah sebesar Rp213.989.719.792,00 (29,22%). Berikut disajikan data alokasi anggaran tahun 2025 per indikator kinerja Sekretariat Daerah:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pendidikan Tinggi	Proporsi Penduduk Usia ≥ 15 Tahun dengan Kualifikasi Pendidikan Tinggi	8.180.000.000,00	1,117
2	Terkendalinya Stabilitas Harga Daerah Jawa Barat	Tingkat Inflasi	116,780,000.00	0,016
3	Meningkatnya Kinerja BUMD	Persentase BUMD Sehat	177.858.707,00	0,024
4	Regulasi Daerah Adaptif	Indeks Reformasi Hukum	4.127.783.624,00	0,564
5	Meningkatnya Efektivitas Dukungan Kebijakan terhadap Pembangunan	Nilai Kualitas Kebijakan Daerah	214,340,719,792.00	29,268



E3ABAE3288

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>

6	Kinerja Daerah Target	Perangkat Mencapai	Persentase Perangkat Daerah dengan Kinerja \geq 0%	152.034.875,00	0,021
7	Meningkatnya Tata Kelola Barang dan Jas	Kualitas Pengadaan	Indeks Tata Kelola Pengadaan	4,171,495,022.00	0.570
8	Meningkatnya Pelayanan Publik Barat	Kualitas Jawa Barat	Indeks Pelayanan Publik	490,375,709,512.00	66.961
9	Kelembagaan Agile	Kelembagaan	Nilai evaluasi	413,875,028.00	0.057
10	Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi	Praktik Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah dengan IRB Kategori A	184,369,303.00	0.025
11	Pelaporan Pemda pada Akselerasi Kinerja Pembangunan	Kinerja Berdampak pada Kinerja	Nilai SAKIP Pemda Dimensi Pelaporan	123,167,521.00	0.017
12	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Status Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	9,963,863,058.00	1.361
TOTAL RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025				732,327,656,442.00	100,00

Dilihat dari program, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi merupakan program dengan alokasi anggaran terbesar yaitu 70,17% dari keseluruhan pagu atau sebesar Rp513.865.963.925,00. Program lain dengan alokasi anggaran signifikan adalah Program Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp200.266.180.406,00 atau 27,35% dari total pagu anggaran. Sementara itu Program Kebijakan Administrasi Pembangunan merupakan program dengan alokasi terendah sebesar Rp152.034.875,00 atau 0,02% dari total pagu anggaran.



E3ABAE3288

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>

No	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	%
1	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	7.579.733.785,00	1,04
2	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	2.420.827.715,00	0,33
3	Program Kesejahteraan Rakyat	200.266.180.406,00	27,35
4	Program Perekonomian Dan Pembangunan	2.650.987.122,00	0,36
5	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	152.034.875,00	0,02
6	Program Perekonomian Dan Pembangunan	2.141.185.660,00	0,29
7	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	2.343.600.446,00	0,32
8	Program Penataan Organisasi	907.142.508,00	0,12
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	513.865.963.925,00	70,17
Total Rencana Alokasi Anggaran		732.327.656.442,00	100,00



E3ABAE3288

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>

03

AKUNTABILITAS KINERJA



E3ABAE3288

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>

Capaian Kinerja

Penggambaran akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah dilakukan melalui pengukuran kinerja yang dihitung dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja dengan realisasinya. Hasil pengukuran terhadap realisasi dan target kinerja tersebut, akan memperlihatkan celah kinerja (performance gap). Selanjutnya, berdasarkan selisih kinerja tersebut dapat dilakukan evaluasi guna memperoleh strategi yang tepat dalam rangka peningkatan kinerja pada periode berikutnya (performance improvement).

Perhitungan persentase tingkat capaian kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Pencapaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Sebaliknya, apabila semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Pencapaian Indikator Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$



Berdasarkan persentase capaian kinerja yang dihasilkan dari metode perbandingan tersebut dilakukan analisis pencapaian akuntabilitas kinerja instansi, seperti yang dijelaskan pada Tabel di bawah ini:

No	Nilai Angka	Interpretasi
1	>90-100	Sangat Memuaskan
2	>80-90	Memuaskan
3	>70-80	Sangat Baik
4	>60-70	Baik
5	>50-60	Cukup
6	>30-50	Kurang
7	>0-30	Sangat Kurang

Dari 12 sasaran strategis dan indikator kinerja Sekretariat Daerah mayoritas menggunakan konsep pengukuran kinerja semakin tinggi semakin baik. Satu indikator yang menggunakan konsep sebaliknya adalah indikator 'Tingkat Inflasi' yang memiliki konsep pengendalian. Bahwa fluktuasi harga barang di masyarakat harus terjaga secara stabil sehingga tidak melambung tinggi sehingga menimbulkan inflasi ataupun merosot tajam sehingga menimbulkan deflasi.



E3ABAE3288

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>

Capaian kinerja Sekretariat Daerah tahun 2025 digambarkan melalui hasil pengukuran 12 indikator kinerja. Secara rata-rata, kinerja tercapai sebesar 108,23%. Sebanyak 8 indikator tercapai di atas 100%, dua indikator tercapai 100%, dan dua indikator tercapai di bawah 100%. Secara rinci, ketercapaian kinerja tersebut disajikan dalam tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pendidikan Tinggi	Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	9,64	9,92	102,90
2	Terkendalinya Stabilitas Harga Daerah Jawa Barat	Tingkat Inflasi	Persen	3,3 - 3,8	2,63	130,79
3	Meningkatnya Kinerja BUMD	Presentase BUMD Sehat	Persen	78,37	68,57	87,50
4	Regulasi Daerah Adaptif	Indeks Reformasi Hukum	Poin	89,7	96,70	107,80
5	Meningkatnya Efektivitas Dukungan Kebijakan terhadap Pembangunan	Nilai Kualitas Kebijakan Daerah	Poin	76,66	81,17	105,88
6	Kinerja Perangkat Daerah Mencapai Target	Persentase Perangkat Daerah dengan Deviasi Kinerja => 0%	Persen	63,28	91,30	144,28



E3ABAE3288

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>

7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Poin	90,3	98,45	109,03
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Jawa Barat	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,76	4,63	97,27
9	Kelembagaan Agile	Nilai Evaluasi Kelembagaan	Poin	68,450	68,450	100,00
10	Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah dengan IRB Kategori A	Persen	89	100	112,36
11	Pelaporan Kinerja Pemda Berdampak pada Akselerasi Kinerja Pembangunan	Nilai SAKIP Pemda Dimensi Pelaporan	Poin	13,58	13,71	100,96
12	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kategori	Tinggi	Tinggi	100,00
Rata-Rata Capaian Kinerja						108,23



E3ABAE3288

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>

SASARAN 1

Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pendidikan Tinggi



Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Capaian 2025

102,90%

Target Realisasi

Kategori **9,64%** Kategori **9,92%**

Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Realisasi 2024	Peningkatan Realisasi
8,81%	1,11%
Capaian 2024	Peningkatan Capaian
N/A	N/A

Tidak ada efisiensi anggaran

Perbandingan dengan target akhir Renstra

Target 2030	Capaian terhadap Renstra
10,20%	97,25%

Perbandingan dengan rata-rata nasional

Rata-Rata Nasional	Lebih Rendah
11%	1,08%

Faktor-faktor yang Mendorong Keberhasilan

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan tinggi



Rekomendasi penyesuaian target Tahun 2026

Realisasi 2025

9,92%

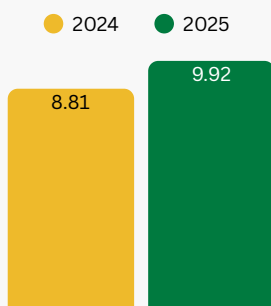
Target 2026

9,75%



> 9,92%

Tren Perkembangan



Upaya perbaikan intervensi (continuous improvement)

- Sinkronisasi data dengan mitra pendidikan
- Sinkronisasi data kependudukan
- Sinkronisasi program prioritas dengan jurusan penerima beasiswa
- Meningkatkan volume pemberian beasiswa

Program terkait:

Program Kesejahteraan Rakyat

Formulasi Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kualifikasi pendidikan tinggi dalam populasi dewasa dan digunakan untuk menilai ketersediaan sumber daya manusia yang berpendidikan tinggi. Kinerja diukur dengan formula: Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah dibagi STTB Perguruan Tinggi pada periode tahun -T dibagi Jumlah penduduk umur 15 tahun pada tahun - T



E3ABAE3288

Akses dan pemerataan pendidikan tinggi di Jawa Barat meningkat. Hal ini ditandai oleh Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi yang kinerjanya mencapai 102,90% dari target yang ditetapkan sebesar 9,64% dan terealisasi sebesar 9,92%. Realisasi kinerja Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi sebesar 9,92% berarti bahwa dari jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat tahun 2025 sebanyak 38 juta orang (BPS Jawa Barat, Februari 2025), sekitar 9,92% atau sebanyak 3.769.600 orang memiliki ijazah/STTB pendidikan tinggi (D3-S1).

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari segi realisasi, Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi meningkat sebesar 1,11% dari realisasi tahun 2024 sebesar 8,81% dan pada tahun 2025 menjadi 9,92%. Namun dari segi capaian kinerja, Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi merupakan indikator kinerja yang baru digunakan pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029, sehingga indikator ini tidak ditargetkan pada Rencana Kerja Tahun 2024 dan dengan demikian tidak dapat dibandingkan.

Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, kinerja Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi belum

mencapai batas aman dari target akhir Renstra yaitu sebesar 97,25% dari target 10,20%. Pada tingkat nasional, Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Provinsi Jawa Barat berada di peringkat ke-32 nasional dan posisinya berada 1,08% di bawah rata-rata nasional sebesar 11% dan Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Provinsi Jawa Barat sebesar 9,92%. Sedangkan Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Provinsi Jawa Barat berada di peringkat ke-1 di Pulau Jawa dan posisinya berada 0,84% di atas rata-rata Pulau Jawa sebesar 9,08%, dengan Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Provinsi Jawa Barat sebesar 9,92%.

Faktor yang mendorong keberhasilan pencapaian peningkatan akses dan pemerataan pendidikan tinggi yaitu meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi yang ditandai dengan Persentase Partisipasi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang melanjutkan ke pendidikan tinggi sebesar 9,83% atau setara dengan sejumlah 3.824.723 orang penduduk usia 15 tahun asal Jawa Barat yang melanjutkan ke pendidikan tinggi. Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi didorong oleh meningkatnya bantuan pendidikan tinggi sebesar 100% atau sebanyak 806 orang pemerlu bantuan yang mendapatkan bantuan dari



E3ABAE3288



Pelepasan KKN Universitas Padjadjaran, 19 Desember 2025

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mencapai peningkatan akses dan pemerataan pendidikan tinggi melalui peningkatan partisipasi pendidikan tinggi yang diintervensi oleh Program Kesejahteraan Rakyat yaitu penyaluran beasiswa perguruan tinggi dan bantuan pendidikan lainnya kepada 806 orang pemerlu bantuan.

Dalam rangka mengakselerasi kinerja Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi tahun 2026, maka perlu dilakukan perubahan target disertai dengan intervensinya. Adapun perubahan target yang direkomendasikan pada tahun 2026 adalah lebih besar dari 9,92%, yaitu dari target tahun 2026 sebesar 9,75% sudah terlampaui oleh realisasi tahun 2025 sebesar 9,92%. Untuk mencapai target

tersebut diperlukan upaya perbaikan tahun 2026 yaitu penyaluran beasiswa perguruan tinggi dan bantuan lainnya sebanyak 100% atau seluruh pengajuan beasiswa yang diajukan.

Program yang mendukung pencapaian Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi adalah Program Kesejahteraan Rakyat. Analisis mendalam dan rinci tentang program yang mendukung pencapaian Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi tergambar dalam faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Efisiensi anggaran atas pencapaian Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi adalah 1,49% atau setara Rp120.000.000,00. Adapun kondisi ini



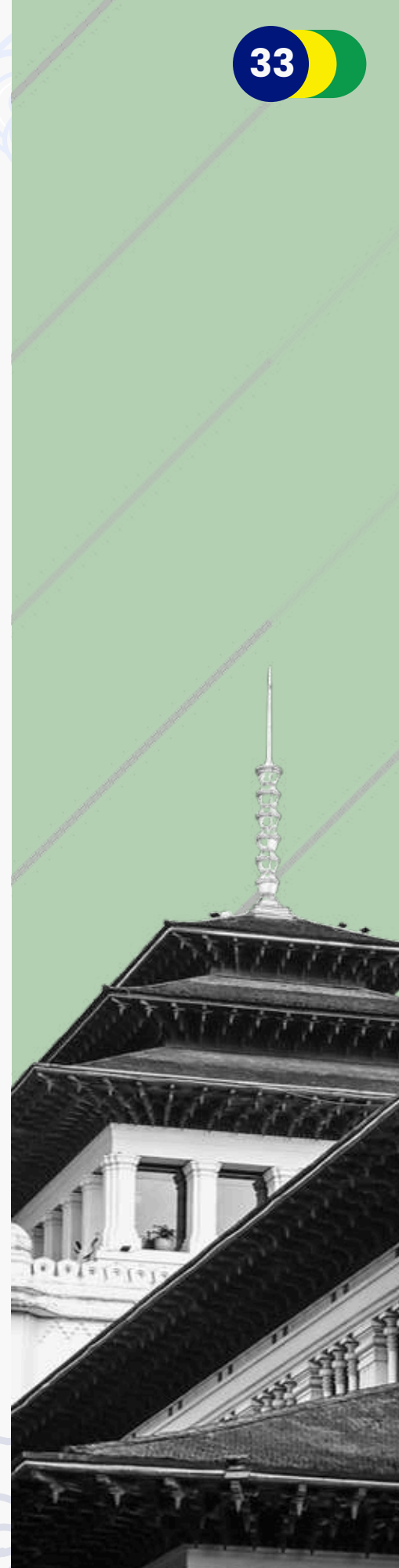
E3ABAE3288

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>

ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp8.180.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp8.060.000.000,00.

Berdasarkan pembahasan sasaran di atas, seluruh indikator kinerja tercapai. Indikator Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi tercapai sebesar 102,90%. Oleh karena itu, kinerja dari sasaran Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi tercapai.



E3ABAE3288

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>

SASARAN 2 **Terkendalinya Stabilitas Harga Daerah Jawa Barat**



Tingkat Inflasi

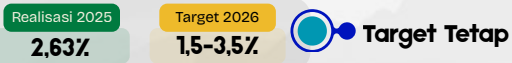
Capaian 2025		Perbandingan dengan tahun sebelumnya		Perbandingan dengan target akhir Renstra	
130,79%		Realisasi 2024 1,64%	Peningkatan Realisasi 0,99%	Target 2030 1,2-3,5%	Capaian terhadap Renstra 124,86%
Target	Realisasi	Capaian 2024 N/A	Peningkatan Capaian N/A	Perbandingan dengan rata-rata nasional	
3,3-3,8%	2,63%	Efisiensi anggaran 1,38% Rp1.610.625,00		Rata-Rata Nasional 2,92%	Lebih Rendah 0,29%

Faktor-faktor yang Mendorong Keberhasilan

- Kebijakan pengendalian inflasi responsif terhadap isu peningkatan harga barang di masyarakat
- Hasil evaluasi terhadap implementasi kebijakan pengendalian inflasi ditindaklanjuti



Rekomendasi penyesuaian target Tahun 2026



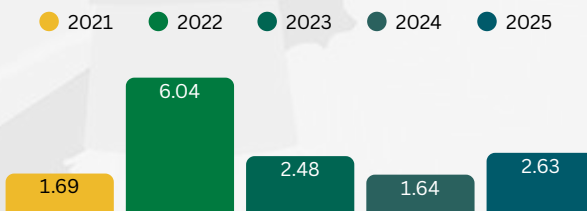
Upaya perbaikan intervensi (continuous improvement)

- Melakukan pemantauan pengendalian inflasi daerah di 27 kabupaten/kota
- Menyusun 1 dokumen kajian analisis pengendalian inflasi daerah di Jawa Barat

Program terkait:

Program Perekonomian dan Pembangunan

Tren Perkembangan



Formulasi Tingkat Inflasi

Merupakan indikator yang menggambarkan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa secara meluas yang berlangsung secara terus menerus dalam wilayah provinsi tertentu. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan komponen yang digunakan untuk mengukur inflasi. Kinerja pengendalian inflasi dihitung dengan menggunakan formula: $IHK_t \text{ dikurangi } IHK_{t-1} \text{ dibagi } IHK_{t-1} \text{ dikali } 100 \text{ persen}$



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>

Stabilitas harga daerah Jawa Barat terkendali. Hal ini ditandai oleh Tingkat Inflasi yang kinerjanya mencapai 130,79% dari target yang ditetapkan sebesar 3,3-3,8% dan terealisasi sebesar 2,63%. Realisasi kinerja Tingkat Inflasi sebesar 2,63% mencerminkan daya beli masyarakat relatif stabil, dengan dinamika harga yang terkendali dan tanpa fluktuasi ekstrem.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari segi realisasi, Tingkat Inflasi di Jawa Barat meningkat sebesar 0,99% dari 1,64% di tahun 2024 menjadi 2,63% di tahun 2025. Namun dari segi capaian kinerja, Tingkat Inflasi merupakan indikator kinerja yang baru digunakan pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029, sehingga indikator ini tidak ditargetkan pada Rencana Kerja Tahun 2024 dan dengan demikian tidak dapat dibandingkan.

Jika dibandingkan beberapa tahun sebelumnya realisasi tingkat inflasi ini menunjukkan lebih terkendali sebesar 0,76%, yaitu dari rata-rata realisasi tahun 2022-2024 sebesar 3,39% dan realisasi tahun 2025 sebesar 2,63%. Sedangkan rata-rata kenaikan tingkat inflasi dari tahun 2022-2025 sebesar 3,20%. Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, kinerja Tingkat Inflasi telah mencapai batas aman Renstra yaitu mencapai 75,14% dari target akhir Renstra yaitu sebesar 3,5%.

Pada tingkat nasional, Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Barat tercatat lebih rendah 0,29% dari tingkat inflasi nasional sebesar 2,92% dan realisasi Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Barat 2,63%. Kondisi ini menempatkan Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan Tingkat Inflasi yang stabil ke-13 di Indonesia.

Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan pencapaian terkendalnya stabilitas harga daerah Jawa Barat oleh:

- 1) Kebijakan pengendalian inflasi responsif terhadap isu peningkatan harga barang di masyarakat yang ditandai dengan persentase kebijakan pengendalian inflasi yang dirumuskan sebesar 100% atau sebanyak 1 dokumen. Kinerja ini dipengaruhi oleh perumusan rekomendasi pengendalian inflasi berbasis data dan bukti sebesar 100%. Adapun upaya yang dilakukan untuk terkendalnya stabilitas harga daerah di Jawa Barat melalui kebijakan pengendalian inflasi responsif terhadap isu peningkatan harga barang di masyarakat yang diintervensi oleh Program Perekonomian dan Pembangunan adalah penyusunan 1 dokumen analisis pengendalian inflasi daerah di Jawa Barat.



E3ABAE3288

Pasamoan Agung

"Sinergi Pengendalian Inflasi dan Percepatan Digitalisasi
untuk HBKN Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang Aman dan Terkendali"

9 Desember 2025



Acara High Level Meeting untuk HBKN Nataru Tahun 2025, 9 Desember 2025

2) Hasil evaluasi terhadap implementasi kebijakan pengendalian inflasi ditindaklanjuti yang ditandai dengan persentase rekomendasi pengendalian inflasi mutakhir yang ditindaklanjuti sebesar sebesar 100% atau sebesar 1 dokumen. Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kualitas rekomendasi pengendalian inflasi sebesar 100% atau sebanyak 1 dokumen. Adapun upaya yang dilakukan untuk terkendalnya stabilitas harga daerah Jawa Barat melalui hasil evaluasi terhadap implementasi kebijakan pengendalian inflasi ditindaklanjuti yang diintervensi oleh Program Perekonomian dan Pembangunan adalah pengendalian inflasi daerah di 27 kabupaten/kota.

Dalam rangka mengakselerasi kinerja Tingkat Inflasi Daerah di Jawa Barat, maka perlu dilakukan perubahan target disertai dengan intervensinya. Namun demikian, ada tahun 2026, tidak perlu dilakukan perubahan target karena realisasi tahun 2025 sebesar

2,63% tidak melampaui target tahun 2026 sebesar 3,3–3,8%. Sehingga target Tingkat Inflasi Daerah di Jawa Barat di tahun 2026 adalah tetap. Adapun upaya peningkatan kinerja yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Tingkat Inflasi Daerah di Jawa Barat di Tahun 2026, antara lain melakukan pemantauan pengendalian inflasi daerah di 27 kabupaten/kota, serta menyusun 1 dokumen kajian analisis pengendalian inflasi daerah di Jawa Barat.

Program yang mendukung pencapaian Terkendalnya Stabilitas Harga Daerah Jawa Barat adalah Program Perekonomian dan Pembangunan. Analisis mendalam dan rinci tentang program yang mendukung pencapaian Terkendalnya Stabilitas Harga Daerah Jawa Barat tergambar dalam faktor-faktor yang mendorong keberhasilan sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.



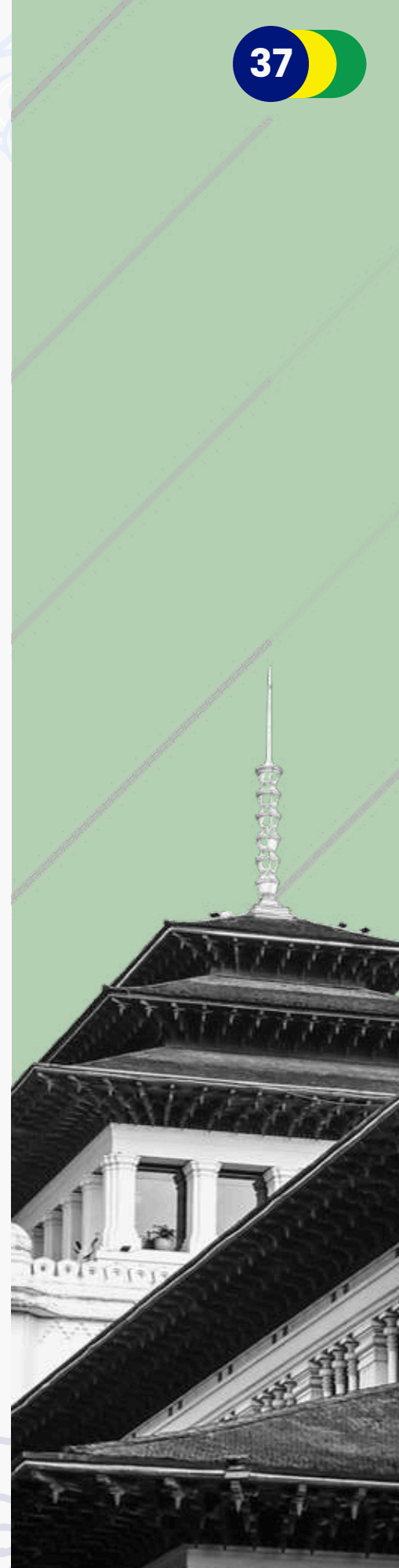
E3ABAE3288

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>

Efisiensi anggaran atas pencapaian tingkat inflasi daerah di Jawa Barat adalah 1,38% atau setara Rp1.610.625,00. Adapun kondisi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp116.780.000,00 dengan realisasi sebesar Rp115.169.375,00.

Berdasarkan pembahasan sasaran di atas, indikator kinerja Tingkat Inflasi tercapai. Indikator Tingkat Inflasi tercapai sebesar 2,63%. oleh karena itu, kinerja dari sasaran Terkendalinya Inflasi Daerah Jawa Barat tercapai.



E3ABAE3288

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>

SASARAN 3

Meningkatnya Kinerja BUMD



Persentase BUMD Sehat

Capaian 2025

87,50%

Target	Realisasi
78,37%	68,57%

Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Realisasi 2024	Penurunan Realisasi
80%	11,4%
Capaian 2024	Peningkatan Capaian
N/A	N/A

Tidak ada efisiensi anggaran

Perbandingan dengan target akhir Renstra

Target 2030	Capaian terhadap Renstra
91,89%	74,62%

Perbandingan dengan rata-rata nasional

Tidak dapat diperbandingkan

Faktor-faktor yang Menyebabkan Kegagalan

- Kinerja keuangan dan struktur permodalan BUMD belum optimal
- Penerapan prinsip *good corporate governance (GCG)* pada sebagian BUMD belum optimal
- Daya saing dan efisiensi BUMD masih relatif terbatas



Rekomendasi penyesuaian target Tahun 2026

Realisasi 2025
68,75%

Target 2026
81,08%

Target Tetap

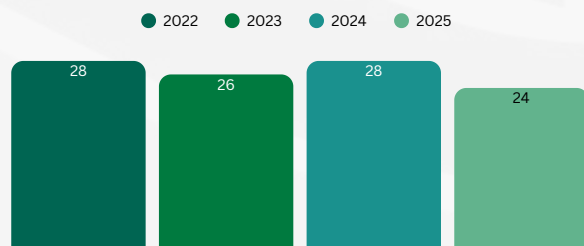
Upaya perbaikan intervensi (continuous improvement)

- Evaluasi kinerja dan pembinaan pada setiap triwulan, semester, dan tahunan pada 35 BUMD
- Penyusunan analisis pemanfaatan aset BUMD sebanyak 2 dokumen

Program terkait:

Program Perekonomian dan Pembangunan

Tren Perkembangan



Formulasi Persentase BUMD Sehat

Merupakan indikator yang mengukur seberapa banyak BUMD Provinsi Jawa Barat dalam kondisi sehat dilihat dari aspek finansial, operasional, dan administratif. Kinerja dihitung dengan menggunakan formula: Jumlah BUMD Jawa Barat berstatus sehat dibagi Jumlah BUMD Jawa Barat secara total dikali 100 persen



E3ABAE3288

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>

Kinerja BUMD Provinsi Jawa Barat mengalami perlambatan. Hal ini ditandai oleh kinerja Persentase BUMD Sehat mencapai 87,5% dari target yang ditetapkan sebesar 78,37% dan terealisasi sebesar 68,57%. Realisasi kinerja Persentase BUMD Sehat sebesar 68,57% yang berarti dari total 36 BUMD, sebanyak 24 BUMD berstatus sehat dan cukup sehat, sedangkan 11 BUMD berstatus tidak sehat. Capaian tersebut mencerminkan kinerja yang cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal dalam memenuhi target kinerja yang ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi yang lebih terarah agar realisasi ke depan dapat tercapai.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari segi realisasi, Persentase BUMD Sehat mengalami penurunan sebesar 11,4% dari realisasi tahun 2024 sebesar 80% dan pada tahun 2025 menjadi 68,57%. Namun, dari segi capaian kinerja, Persentase BUMD Sehat merupakan indikator kinerja yang baru digunakan pada Rencana Strategis Setda Tahun 2025–2029, sehingga indikator ini tidak ditargetkan pada Rencana Kerja Tahun 2024 dan dengan demikian tidak dapat dibandingkan.

Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, realisasi Persentase BUMD Sehat ini lebih rendah sebesar 9,53%, yaitu dari rata-rata realisasi tahun 2020–2024 yang sebesar 78,10%

dan realisasi tahun 2025 sebesar 68,57%. Sedangkan rata-rata penurunan Persentase BUMD Sehat dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sebesar -3,81%.

Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, kinerja Persentase BUMD Sehat belum mencapai batas aman Renstra sebesar 91,89%, karena hanya terealisasi sebesar 74,62%.

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian meningkatnya kinerja BUMD yaitu meningkatnya kualitas tata kelola keuangan BUMD yang ditandai dengan Return On Assets (RoA) BUMD Jabar sebesar 0,62%. Kinerja ini dipengaruhi oleh pemanfaatan aset secara optimal oleh 32 BUMD atau sebesar 91,42% adari total BUMD. Adapun upaya yang dilakukan untuk Meningkatkan Kinerja BUMD adalah melalui Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan BUMD yang diintervensi oleh Program Perekonomian dan Pembangunan antara lain Penyusunan Analisis Pemanfaatan Aset BUMD Non Lembaga Keuangan sebanyak 1 dokumen dan Penyusunan Analisis Pemanfaatan Aset BUMD Lembaga Keuangan sebanyak 1 dokumen.

Program yang mendukung pencapaian Meningkatnya Kinerja BUMD adalah Program Perekonomian dan Pembangunan. Analisis mendalam dan rinci tentang program yang mendukung pencapaian Meningkatnya



E3ABAE3288

Kinerja BUMD tergambar dalam faktor-faktor yang mendorong keberhasilan sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Efisiensi anggaran atas pencapaian Persentase BUMD Sehat tidak dapat dianalisis, hal ini disebabkan indikator Persentase BUMD Sehat tidak mencapai target.

Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan persentase BUMD sehat dan upaya perbaikan di tahun 2026:

Faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya capaian Persentase BUMD Sehat antara lain masih terdapat BUMD dengan kinerja keuangan yang belum optimal, penerapan tata kelola perusahaan yang belum sepenuhnya berjalan efektif, serta keterbatasan daya saing usaha BUMD dalam

menghadapi dinamika pasar dan transformasi model bisnis. Berikut rincian penjelasannya:

1) Kinerja keuangan dan struktur permodalan BUMD belum optimal: Sebagian BUMD masih menghadapi tantangan dalam menjaga tingkat profitabilitas dan efisiensi operasional. Hal ini tercermin dari rendahnya tingkat pengembalian investasi (return on asset/RoA), struktur permodalan yang belum optimal, serta tingginya beban operasional dibandingkan dengan pendapatan usaha. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian BUMD belum mampu menghasilkan nilai ekonomi yang memadai bagi pemerintah daerah sebagai pemegang saham. Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa pemanfaatan aset perusahaan belum sepenuhnya optimal dan

RUPS RBB 2026 PT BPR Karya Utama Jabar, 17 Desember 2025



E3ABAE3288

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>

strategi pengembangan usaha belum diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi.

Upaya perbaikan yang dilakukan untuk menangani kondisi ini antara lain:

a) Melaksanakan evaluasi kinerja dan pembinaan terhadap 35 BUMD dengan tujuan menilai efektivitas strategi bisnis, struktur biaya, dan model pengelolaan aset;

b) Menyusun 2 dokumen analisis pemanfaatan aset BUMD dengan tujuan optimalisasi pemanfaatan aset perusahaan untuk mendukung peningkatan kinerja usaha.

2) Penerapan tata kelola perusahaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang belum optimal: Penerapan prinsip GCG pada sebagian BUMD masih belum optimal, khususnya dalam aspek manajemen risiko, sistem pengendalian internal, serta profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan. Kondisi tersebut cukup mempengaruhi efektivitas pengendalian keputusan strategis, akuntabilitas pengelolaan perusahaan, serta keberlanjutan kinerja usaha BUMD.

Upaya perbaikan yang dilakukan untuk menangani kondisi ini adalah dengan melakukan evaluasi kinerja dan pembinaan terhadap 35 BUMD, dengan fokus pada penguatan sistem manajemen risiko, peningkatan kualitas pengawasan perusahaan, serta profesionalisasi pengelolaan usaha.

3) Daya saing dan efisiensi usaha BUMD masih relatif terbatas: Sebagian BUMD masih menghadapi keterbatasan dalam meningkatkan daya saing usaha, baik dari sisi efisiensi operasional, inovasi produk dan layanan, maupun pemanfaatan teknologi dalam pengembangan bisnis. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi model bisnis BUMD belum berjalan secara optimal untuk menyesuaikan dengan perkembangan pasar dan kebutuhan ekonomi daerah. Upaya perbaikan yang akan dilakukan antara lain:

a) Melaksanakan evaluasi kinerja dan pembinaan terhadap 35 BUMD untuk mendorong transformasi model bisnis dan peningkatan efisiensi usaha;

b) Menyusun 2 dokumen analisis pemanfaatan aset BUMD sebagai dasar perumusan strategi pengembangan usaha yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Berdasarkan pembahasan sasaran di atas, Indikator Kinerja Persentase BUMD Sehat tidak tercapai sebesar 9,8%. Oleh karena itu, kinerja dari sasaran meningkatnya Kinerja BUMD Provinsi Jawa Barat tidak tercapai.



SASARAN 4

Regulasi Daerah Adaptif



Indeks Reformasi Hukum

Capaian 2025

107,80%

Target	Realisasi
89,7 poin	96,7 poin

Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Realisasi 2024	Peningkatan Realisasi
89,3 poin	7,40 poin
Capaian 2024	Peningkatan Capaian
107,16%	0,64%

Efisiensi anggaran 0,09%
Rp3.678.137,00

Perbandingan dengan target akhir Renstra

Target 2030	Capaian terhadap Renstra
92,33 poin	104,73%

Perbandingan dengan rata-rata nasional

Rata-Rata Nasional	Lebih Tinggi
89,05 poin	7,65 poin

Faktor-faktor yang Mendorong Keberhasilan

- Meningkatnya kualitas deregulasi peraturan perundang-undangan Provinsi Jawa Barat
- Meningkatnya harmonisasi regulasi daerah Jawa Barat



Rekomendasi penyesuaian target Tahun 2026

Realisasi 2025	Target 2026	> 96,7 poin
96,7 poin	90,23 poin	

Upaya perbaikan intervensi (continuous improvement)

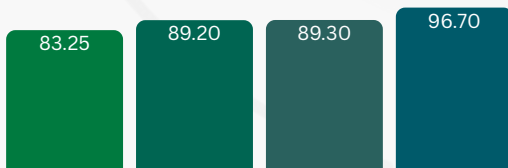
- Pembinaan pada 59 anggota JDIH di Jawa Barat
- Penyusunan 1 dokumen penilaian IKD
- Evaluasi 3 produk hukum daerah provinsi

Program terkait:

Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Tren Perkembangan

● 2022 ● 2023 ● 2024 ● 2025



Formulasi Indeks Reformasi Hukum

Merupakan indikator yang mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, serta penguatan sistem regulasi nasional maupun daerah. Kinerja dihitung dengan menggunakan formula: penjumlahan bobot dari empat komponen yaitu tingkat koordinasi hukum, kompetensi perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas, kualitas re-regulasi atau deregulasi peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil revidi, dan penataan database peraturan perundang-undangan



Regulasi daerah Provinsi Jawa Barat adaptif. Hal ini ditandai oleh kinerja Indeks Reformasi Hukum mencapai 107,80% dari target yang ditetapkan sebesar 89,70% dan terealisasi sebesar 96,70%. Realisasi Indeks Reformasi Hukum sebesar 96,70 poin masuk dalam kategori istimewa yang menunjukkan bahwa perancang peraturan perundang-undangan di Jawa Barat sudah memenuhi kompetensi, pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum, kelengkapan permohonan harmonisasi rancangan perda sesuai persyaratan, dan telah melaksanakan deregulasi.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari segi realisasi, Indeks Reformasi Hukum meningkat sebesar 7,40 poin dari tahun sebelumnya yaitu Tahun 2024 sebesar 89,70 poin dan pada tahun 2025 menjadi 96,70 poin. Begitu juga dengan aspek capaian, Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 0,64% dari tahun sebelumnya yaitu Tahun 2024 sebesar 107,16% dan Tahun 2025 mencapai 107,80%.

Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, realisasi indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 ini lebih baik sebesar 7,08 poin. Mulai Tahun 2022 hingga Tahun 2024, rata-rata peningkatan Indeks Reformasi Hukum sebesar 4,5 poin.

Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 sudah mencapai batas aman target akhir Renstra yaitu sebesar 105,34% dari target sebesar 91,80 poin terealisasi sebesar 96,7 poin. Adapun pada level nasional, Indeks Reformasi Hukum Jawa Barat lebih tinggi 7,65 poin dari Indeks Reformasi Hukum Nasional sebesar 89,05 poin.

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian Regulasi Daerah Adaptif antara lain :

- 1) Meningkatnya harmonisasi regulasi daerah yang ditandai dengan Nilai Harmonisasi Regulasi sebesar 23,5 poin. Meningkatnya harmonisasi regulasi daerah didukung oleh pertama, meningkatnya kesesuaian produk hukum daerah kabupaten/kota dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar 100% atau sebesar 900 produk hukum kabupaten/kota. Kedua, meningkatnya pembinaan desa/kelurahan sadar hukum di Jawa Barat sebesar 56,79% atau 3.383 Desa/Kelurahan dari 5.957 Desa/Kelurahan di Jawa Barat telah ditetapkan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Ketiga, meningkatnya kualitas pengelolaan informasi hukum sebesar 100% atau sebanyak 100 anggota JDIH di wilayah Provinsi Jawa Barat. Keempat, meningkatnya penyebaran layanan produk hukum dan informasi hukum kepada masyarakat sebesar 100% atau sebanyak 120 produk hukum. Kelima,



E3ABAE3288

meningkatnya kualitas layanan kajian hukum sebesar 100% atau sebanyak 12 dokumen kajian. Keenam, meningkatnya kualitas penanganan perkara sebesar 100% atau sebanyak 38 perkara. Ketujuh, penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM (P5HAM) terimplementasi secara tepat oleh perangkat daerah sebesar 100% atau 38 perangkat daerah. Kedelapan, meningkatnya layanan bantuan hukum untuk masyarakat miskin 100% atau sebanyak 41 perkara. Kesembilan, meningkatnya kualitas penanganan pengaduan dan perlindungan hukum yang ditandai dengan persentase pengaduan dan perlindungan hukum yang ditangani sesuai ketentuan sebesar 100% atau sebanyak 643 pengaduan.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai Regulasi Daerah Adaptif melalui meningkatnya harmonisasi regulasi daerah yang diintervensi oleh program fasilitasi dan koordinasi hukum antara lain pelaksanaan pelayanan permohonan kajian rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota wilayah I sebesar 100% atau sebanyak 264 rancangan produk hukum daerah, pelaksanaan pelayanan permohonan kajian rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota wilayah II sebesar 100% atau sebanyak 325 rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota wilayah II sebesar 100% atau sebanyak

325 rancangan produk hukum daerah, pelaksanaan pelayanan permohonan kajian rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota wilayah III sebesar 100% atau sebanyak 211 rancangan produk hukum daerah, pelaksanaan pelayanan permohonan kajian rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota wilayah IV sebesar 100% atau sebanyak 412 rancangan produk hukum daerah, pelaksanaan permohonan nomor register rancangan peraturan daerah kabupaten/kota yang diberikan nomor register sebesar 100% atau sebanyak 257 rancangan peraturan daerah, penetapan desa/kelurahan sadar hukum sebanyak 208 Desa/Kelurahan di Jawa Barat, pelatihan paralegal desa sebanyak 1000 orang, pembinaan desa/kelurahan sadar hukum sebanyak 160 desa/kelurahan di Jawa Barat, pembinaan anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum di wilayah Provinsi Jawa Barat sebanyak 100 anggota, pelaksanaan penyediaan layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum sebanyak 120 produk hukum, penyediaan informasi hukum yang disampaikan melalui media sosial sebesar 36 dokumen, penyebarluasan informasi hukum di wilayah Provinsi Jawa Barat dengan jumlah peserta 59 orang, pelayanan permohonan kajian hukum sebanyak 12 dokumen, penanganan perkara perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris



E3ABAE3288

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>



Pembahasan Ranperda Provinsi Jawa Barat tentang RPJMD Tahun 2025–2029, 9 Oktober 2025

Daerah dan Pejabat/Organisasi Perangkat Daerah secara litigasi sebanyak 38 Perkara, pendampingan hukum secara non litigasi yang diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah dan Pejabat/Organisasi Perangkat Daerah sebanyak 22 Pendampingan, penyusunan dan penyampaian Laporan Aksi HAM serta Laporan Bisnis HAM sebanyak 4 dokumen laporan, sosialisasi pelayanan publik berbasis HAM kepada 38 perangkat daerah, pelayanan permohonan bantuan hukum untuk masyarakat miskin melalui organisasi bantuan hukum sebanyak 41 perkara, dan penanganan pengaduan dan perlindungan hukum sebanyak 643 pengaduan dari masyarakat melalui *bale pananggeuhan*.

2) Meningkatnya kualitas deregulasi peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan nilai deregulasi kebijakan sebesar 28,2 poin. Meningkatnya kualitas deregulasi peraturan perundang-undangan

didukung oleh pertama, peraturan gubernur dan Keputusan gubernur sesuai standar sebesar 100 persen atau sebanyak 46 Peraturan Gubernur dan 898 Keputusan Gubernur. Kedua, peraturan daerah sesuai standar sebesar 83,08 poin.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai Regulasi Daerah Adaptif melalui meningkatnya kualitas deregulasi peraturan perundang-undangan yang diintervensi oleh Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum antara lain penyusunan rancangan keputusan gubernur sebanyak 898 rankepgub (rancangan keputusan gubernur), sosialisasi rancangan peraturan daerah sebanyak 11 ranperda (rancangan peraturan daerah), penyusunan evaluasi produk hukum daerah provinsi sebanyak 12 dokumen evaluasi, penyusunan rancangan peraturan gubernur yang harmonis dan sinergis sebanyak 50 ranpergub (rancangan peraturan gubernur),



E3ABAE3288

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>

SASARAN 5

Meningkatnya Efektivitas Dukungan Kebijakan terhadap Pembangunan



Nilai Kualitas Kebijakan Daerah

Capaian 2025

105,88%

Target	Realisasi
76,66 poin	81,17 poin

Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Realisasi 2024	Peningkatan Realisasi
75,9 poin	5,27 poin
Capaian 2024	Peningkatan Capaian
N/A	N/A

Efisiensi anggaran 0,87%
Rp1.863.122.929,34

Perbandingan dengan target akhir Renstra

Target 2030	Capaian terhadap Renstra
79,77 poin	101,76%

Perbandingan dengan rata-rata nasional

Tidak dapat diperbandingkan

Faktor-faktor yang Mendorong Keberhasilan

- Meningkatnya kebijakan yang berbasis data dan bukti
- Meningkatnya kebijakan yang diimplementasi secara tepat



Rekomendasi penyesuaian target Tahun 2026

Realisasi 2025	Target 2026
81,17 poin	77,43 poin

> 81,17 poin

Upaya perbaikan intervensi (continuous improvement)

- Penyusunan kajian kebijakan bidang administrasi pertanahan sebanyak 3 kajian

Program terkait:

- Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
- Program Kesejahteraan Rakyat
- Program Perekonomian dan Pembangunan
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



Formulasi Nilai Kualitas Kebijakan

Merupakan indikator yang menilai kualitas kebijakan yang dikeluarkan Sekretariat Daerah dimulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Instrumen ini merupakan adopsi dari pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan yang dibangun oleh Lembaga Administrasi Negara untuk mendorong penguatan partisipasi publik dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam proses pembuatan kebijakan publik. Kinerja dihitung dengan menggunakan formula: pembobotan pada penjumlahan komponen perencanaan kebijakan (agenda setting dan formulasi kebijakan) serta evaluasi kemanfaatan kebijakan (implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan)



Efektivitas dukungan kebijakan terhadap pembangunan meningkat. Hal ini ditandai oleh Nilai Kualitas Kebijakan Daerah yang kinerjanya mencapai 105,88% dari target yang ditetapkan sebesar 76,66 poin dan terealisasi sebesar 81,17 poin. Realisasi kinerja Nilai Kualitas Kebijakan Daerah sebesar 81,17 poin yang berarti kebijakan daerah yang dihasilkan telah mengedepankan prinsip kebijakan berbasis bukti, partisipatif, serta responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari segi realisasi, Nilai Kualitas Kebijakan Daerah meningkat sebesar 5,27 poin dari realisasi tahun 2024 sebesar 75,9 poin dan pada tahun 2025 menjadi 81,17 poin. Sedangkan dari segi capaian kinerja, Nilai Kualitas Kebijakan Daerah merupakan indikator kinerja yang baru digunakan pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029, sehingga indikator ini tidak ditargetkan pada Rencana Kerja tahun 2024 dan dengan demikian untuk capaian kinerja tidak dapat dibandingkan.

Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, realisasi Nilai Kualitas Kebijakan Daerah ini menunjukkan lebih rendah sebesar 4,81 poin yaitu dari realisasi tahun 2024 sebesar 85,98 poin dan realisasi tahun 2025 sebesar 81,17 poin. Namun demikian, dari segi capaian kinerja,

Nilai Kualitas Kebijakan merupakan indikator kinerja yang baru digunakan pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2029, sehingga indikator ini tidak ditargetkan pada Rencana Kerja Tahun 2024, oleh karena itu tidak dapat dibandingkan.

Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, capaian Nilai Kualitas Kebijakan Daerah telah mencapai batas aman Renstra yaitu mencapai 101,76% dari target akhir Renstra sebesar 79,77 poin dan terealisasi sebesar 81,17 Poin.

Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan pencapaian Efektivitas Dukungan Kebijakan terhadap Pembangunan antara lain:

1) Meningkatnya Efektivitas Dukungan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat terhadap Pembangunan yang ditandai dengan Nilai Kualitas Perencanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat sebesar 37,70 poin. Kondisi tersebut didukung oleh pertama, Kebijakan Keagamaan Berkualitas sebesar 71,41% atau sebanyak 6 kebijakan pembinaan mental dan spiritual yang berbasis data dan bukti. Kedua, Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Berkualitas sebesar 71,41% atau sebanyak 21 kebijakan kesejahteraan rakyat bidang Pelayanan Dasar yang berbasis data dan bukti. Ketiga, Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Berkualitas sebesar 71,41% yang berarti sebanyak 7



kebijakan telah berbasis data dan bukti.

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk tercapainya tingkat efektivitas dukungan kebijakan terhadap pembangunan melalui meningkatnya efektivitas dukungan kebijakan Kesejahteraan Rakyat terhadap pembangunan yang diintervensi oleh Program Kesejahteraan Rakyat antara lain Perumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sarana dan Prasarana Spiritual dari Perangkat Daerah dikaji dan diusulkan sebesar 100% yang berarti sebanyak 2 dokumen telah difasilitasi perumusan kebijakannya; penyusunan rumusan kebijakan urusan sarana dan prasarana keagamaan sebanyak 1 dokumen; penyusunan rekomendasi perbaikan sarana dan prasarana keagamaan sebanyak 3 dokumen; penyaluran hibah sarana dan prasarana spiritual sebesar 100% sebesar Rp9.250.000.000,00 yang ditunjukkan dengan telah disalurkan hibah kepada 2 (dua) lembaga; penyusunan kajian kebijakan sarana dan prasarana spiritual sebanyak 1 kajian; memperingati 4 hari besar keagamaan dengan laporan sebanyak 4 dokumen; penyusunan rumusan kebijakan urusan kelembagaan bina spiritual sebanyak 1 dokumen; perumusan kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang Kelembagaan Bina Spiritual dari perangkat daerah dikaji dan diusulkan

sebanyak 100% atau sebanyak 1 rumusan kebijakan telah difasilitasi; penyaluran hibah kelembagaan bina spiritual sebesar 100% sebesar Rp24.010.000.000,00 telah disalurkan kepada 8 lembaga keagamaan; penyusunan kajian kebijakan kelembagaan spiritual sebanyak 2 dokumen; penyusunan rekomendasi perbaikan kebijakan kelembagaan spiritual sebanyak 1 dokumen; penyusunan rekomendasi perbaikan kebijakan pendidikan sebanyak 1 dokumen; perumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan dari perangkat daerah dikaji dan diusulkan sebesar 100% atau sebanyak 4 kebijakan telah difasilitasi; penyusunan rumusan kebijakan kesehatan sebanyak 1 dokumen, perumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesehatan dari perangkat daerah dikaji dan diusulkan sebanyak 100% atau sebanyak 4 kebijakan telah difasilitasi; penyusunan kajian kebijakan kesehatan sebanyak 1 kajian; penyusunan rekomendasi perbaikan kebijakan kesehatan sebanyak 2 dokumen; perumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang sosial dari perangkat daerah dikaji dan diusulkan sebesar 100% atau sebanyak 6 kebijakan telah difasilitasi; perumusan rumusan kebijakan sosial sebanyak 3 dokumen; perumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kepemudaan olahraga, kebudayaan dan pariwisata dari perangkat daerah



E3ABAE3288

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>

dikaji dan diusulkan sebesar 100% atau sebanyak 1 kebijakan telah difasilitasi; penyusunan rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata sebanyak 2 dokumen; penyusunan kajian kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata sebanyak 1 dokumen; perumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja dari perangkat daerah dikaji dan diusulkan sebanyak 100% atau sebanyak 11 kebijakan telah difasilitasi; penyusunan kajian kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja sebanyak 2 dokumen; penyusunan rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja sebanyak 2 dokumen; penyusunan rekomendasi perbaikan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja sebanyak 3 dokumen; perumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang komunikasi, informatika, statistik, persandian dan perhubungan dari perangkat daerah di kaji dan diusulkan sebesar 100% atau sebanyak 1 kebijakan telah difasilitasi; penyusunan rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang komunikasi, informatika, statistik, persandian, dan perhubungan sebanyak 1 dokumen; penyusunan rekomendasi perbaikan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang komunikasi, informatika, statistik, persandian, dan perhubungan sebanyak 1 dokumen; penyusunan kajian kebijakan kesejahteraan rakyat bidang komunikasi, informatika, statistik, persandian, dan perhubungan sebanyak 1 dokumen.

2) Meningkatnya Efektivitas Dukungan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat terhadap Pembangunan yang ditandai dengan Nilai Kualitas Evaluasi



E3ABAE3288

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>

Pemanfaatan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat sebesar 43,51 poin. Kondisi tersebut didukung oleh pertama, kebijakan Keagamaan Terimplementasi secara Tepat sebesar 75% atau sebanyak 6 kebijakan terimplementasi dari total 8 kebijakan yang dihasilkan. Kedua, Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Terimplementasi secara Tepat sebesar 72,41% sebanyak 21 rumusan kebijakan terimplementasi dari total 29 rumusan kebijakan yang dihasilkan. Ketiga, Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Terimplementasi secara Tepat yang ditandai sebesar 77,77% sebanyak 7 kebijakan terimplementasi dibandingkan dari total 9 kebijakan yang dihasilkan.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai Meningkatnya Efektivitas Dukungan Kebijakan terhadap Pembangunan melalui Meningkatnya Efektivitas Dukungan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat terhadap Pembangunan yang diintervensi Program Kesejahteraan Rakyat antara lain pemantauan implementasi kebijakan sarana prasarana keagamaan sebanyak 4 dokumen; pemantauan implementasi kebijakan bidang kelembagaan bina spiritual sebanyak 2 dokumen; pemantauan implementasi kebijakan pendidikan sebanyak 1 dokumen; pemantauan implementasi kebijakan kesehatan sebanyak 1 dokumen; pemantauan implementasi kebijakan sosial sebanyak 2 dokumen; pemantauan

implementasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang komunikasi, informatika, statistik, persandian, dan perhubungan sebanyak 1 dokumen; pemantauan implementasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja sebanyak 2 dokumen; pemantauan implementasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata sebanyak 1 dokumen.

3) Meningkatnya Efektivitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam Mendukung Pembangunan yang ditandai dengan Nilai Kualitas Perencanaan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebesar 40,84 poin. Kondisi tersebut didukung oleh pertama perencanaan kebijakan pemerintahan berkualitas melalui kebijakan pemerintahan yang berbasis data dan bukti sebesar 42,33% atau sebanyak 8 rumusan kebijakan telah disusun secara komprehensif. Kedua, implementasi dan evaluasi kebijakan pemerintahan berkualitas sebesar 36,17%.

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Efektivitas Dukungan Kebijakan terhadap Pembangunan melalui efektivitas kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang diintervensi oleh Program



E3ABAE3288

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>



Sosialisasi dan Pendataan Awal Persiapan Pengadaan Tanah Pembangunan Daerah Irigasi Sadwarna, 8 Desember 2025.

Pemerintahan dan Otonomi Daerah antara lain, pertama pemantauan penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebanyak 12 lokasi; penyusunan kajian kebijakan bidang kebencanaan sebanyak 4 kajian; pelayanan permohonan Penetapan lokasi pengadaan tanah bagi kepentingan umum sebanyak 100 persen; penyusunan Kajian Kebijakan Bidang Administrasi Pertanahan sebanyak 3 Kajian.

4) Meningkatkan Efektivitas Kebijakan Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah dalam Mendukung Pembangunan yang ditandai dengan Nilai Kualitas Perencanaan Kebijakan Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah sebesar 44,00 poin. Kondisi tersebut didukung oleh pertama, perencanaan kebijakan sarana perekonomian berkualitas sebesar 100% atau sebanyak 2 dokumen yang

yang disusun secara komprehensif berbasis data dan analisis kebutuhan daerah sebagai dasar perumusan arah kebijakan sarana perekonomian. Kedua, perencanaan kebijakan sumber daya alam berkualitas sebesar 100% atas sebanyak 2 dokumen yang disusun secara komprehensif berbasis data dan analisis kebutuhan daerah sebagai dasar perumusan arah kebijakan sumber daya alam.

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Efektivitas Dukungan Kebijakan terhadap Pembangunan melalui efektivitas kebijakan perekonomian dan infrastruktur wilayah yang diintervensi Program Perekonomian dan Pembangunan antara lain penyusunan kebijakan kelembagaan penyelesaian sengketa konsumen sebanyak 4 dokumen; penyusunan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah sebanyak 1 dokumen; perumusan kebijakan



pengelolaan produksi pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan di Jawa Barat sebanyak 1 dokumen; perumusan kebijakan regenerasi petani di Jawa Barat untuk peningkatan ketahanan pangan di daerah Jawa Barat sebanyak 1 dokumen.

5) Meningkatnya Efektivitas Kebijakan Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah dalam Mendukung Pembangunan sasaran yang ditandai dengan Nilai Kualitas Evaluasi Pemanfaatan Kebijakan Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah sebesar 43,00 poin. Kondisi tersebut didukung oleh pertama Implementasi dan evaluasi kebijakan perekonomian yang berkualitas sebesar 100% atau sebanyak 2 dokumen yang memuat hasil evaluasi terhadap pemanfaatan kebijakan perekonomian sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan kebijakan pembangunan daerah. Kedua, implementasi dan evaluasi Kebijakan sumber daya alam yang berkualitas sebesar 100% atau sebanyak 1 dokumen kebijakan yang memuat hasil evaluasi terhadap pemanfaatan kebijakan sumber daya alam sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan kebijakan pembangunan daerah.

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Efektivitas Dukungan Kebijakan terhadap Pembangunan melalui efektivitas kebijakan perekonomian dan infrastruktur wilayah antara lain pemantauan

Pengelolaan Kredit program ke 7 kabupaten/kota; pemantauan pengembangan konektivitas antar wilayah di Jawa Barat ke 4 lokasi; penentuan Percepatan Investasi Daerah ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido di Kabupaten Bogor; pemantauan pemanfaatan DBHCHT ke 26 kab/kota; pemantauan Kebijakan Pengelolaan Air Minum ke 4 Kab/Kota; pemantauan pengelolaan sampah regional di Jawa Barat ke 3 lokasi; pemantauan program pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan ke 5 Kab/kota.

6) Meningkatnya Efektivitas Dukungan Kebijakan BUMD, BLUD, dan Investasi Daerah terhadap Pembangunan yang ditandai dengan Nilai Kualitas Perencanaan Kebijakan BUMD, BLUD, dan Investasi Daerah sebesar 40,97 poin. Kondisi tersebut didukung antara lain oleh pertama, perencanaan Kebijakan Investasi Berkualitas sebesar 100% atau sebanyak 1 dokumen, yaitu dokumen Keputusan Gubernur tentang Penasihat Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 yang disusun secara komprehensif berbasis data dan analisis kebutuhan pengembangan BUMD. Kedua, perencanaan kebijakan BUMD dan BLUD berkualitas sebesar 100% atau sebanyak 1 kebijakan, antara lain kebijakan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BUMD yang disusun secara komprehensif berbasis data dan analisis kebutuhan pengembangan BUMD.



E3ABAE3288

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>

Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai Meningkatnya Efektivitas Dukungan Kebijakan terhadap Pembangunan melalui Meningkatnya Efektivitas Dukungan Kebijakan BUMD, BLUD, dan Investasi Daerah terhadap Pembangunan yang diintervensi oleh Program Perekonomian dan Pembangunan antara lain penyusunan kajian kebijakan investasi daerah dan inovasi sebanyak 1 kebijakan; perumusan kebijakan investasi daerah dan inovasi pembiayaan sebanyak 3 kebijakan; penyusunan kajian kebijakan BLUD sebanyak 1 kajian; penyusunan kajian kebijakan BUMD lembaga keuangan sebanyak 3 kajian; perumusan kebijakan BUMD lembaga keuangan sebanyak 2 kebijakan; perumusan kebijakan BLUD sebanyak 1 kebijakan; penyusunan kajian kebijakan BUMD non lembaga keuangan sebanyak 4 kajian; perumusan kebijakan BUMD non lembaga keuangan sebanyak 3 kebijakan.

Meningkatnya Efektivitas Dukungan Kebijakan BUMD, BLUD, dan Investasi Daerah terhadap Pembangunan yang ditandai dengan Nilai Kualitas Evaluasi Pemanfaatan Kebijakan BUMD, BLUD, dan Investasi Daerah sebesar 41,17 poin. Kondisi tersebut, didukung oleh pertama, implementasi dan evaluasi kebijakan investasi berkualitas sebesar 100%, atau sebanyak 1 Kebijakan yaitu tentang Panitia Seleksi Calon Direksi Dan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah Non lembaga Keuangan pada tahun 2023, yang telah dievaluasi

pemanfaatannya sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan kebijakan pengembangan BUMD Provinsi Jawa Barat. Kedua, implementasi dan evaluasi kebijakan BUMD Dan BLUD yang berkualitas sebesar 100% atau sebanyak 2 kebijakan, yaitu kebijakan Peraturan Daerah Jawa Barat No. 4 Tahun 2024 tentang Penggabungan PT BPR Karya Utama Jabar, PT BPR Wibawa Mukti Jabar, PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar dan PT BPR Majalengka Jabar dan kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Barat No 56 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pada BLUD di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang juga telah dievaluasi pemanfaatannya sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan kebijakan pengembangan BUMD Provinsi Jawa Barat.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai Meningkatnya Efektivitas Dukungan Kebijakan terhadap Pembangunan melalui Meningkatnya Efektivitas Dukungan Kebijakan BUMD, BLUD, dan Investasi Daerah terhadap Pembangunan yang diintervensi oleh program Perekonomian dan Pembangunan antara lain implementasi kebijakan investasi daerah dan inovasi pembiayaan sebanyak 1 kebijakan; evaluasi kebijakan investasi daerah dan inovasi pembiayaan sebanyak 1 kebijakan; evaluasi kebijakan BLUD sebanyak 1 kebijakan; sosialisasi kebijakan BLUD sebanyak 1 kebijakan; evaluasi kebijakan BUMD non lembaga



keuangan sebanyak 3 kebijakan; sosialisasi kebijakan BUMD non lembaga keuangan sebanyak 3 kebijakan; evaluasi kebijakan BUMD lembaga keuangan sebanyak 3 kebijakan; pembangunan fitur pada aplikasi simpelkeu sebanyak 1 fitur; sosialisasi kebijakan BUMD lembaga keuangan sebanyak 1 kebijakan.

Dalam rangka mengakselerasi kinerja Meningkatnya Efektivitas Dukungan Kebijakan terhadap Pembangunan, maka perlu dilakukan perubahan target disertai dengan intervensinya. Adapun perubahan target yang direkomendasikan pada tahun 2026 adalah lebih besar dari 81,17 poin yaitu dari target tahun 2026 sebesar 77,43 poin sudah terlampaui oleh realisasi tahun 2025 sebesar 81,17 poin. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan upaya-upaya perbaikan tahun 2026 seperti penyusunan kajian kebijakan bidang Administrasi Pertanahan dengan target sebanyak 3 kajian di bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Adapun upaya perbaikan di bidang perekonomian dan pembangunan antara lain penyusunan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah sebanyak 1 dokumen; penyusunan kebijakan pengelolaan produksi pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan di Jawa Barat sebanyak 1 dokumen; penyusunan kebijakan kelembagaan penyelesaian sengketa konsumen sebanyak 2 dokumen; pemantauan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah di 12 Kabupaten/kota se-Jawa Barat; pemantauan implementasi

kebijakan produk bersertifikasi halal sebanyak 600 sertifikat; pemantauan kebijakan ekonomi makro dan mikro di 12 kabupaten/kota; pemantauan pemanfaatan DBHCHT di 27 kabupaten/kota; pemantauan kebijakan pengelolaan energi sumber daya mineral dan air di 27 kabupaten/kota; pemantauan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan alih fungsi lahan di 6 kabupaten/kota; pemantauan implementasi kebijakan pengelolaan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan di 27 kabupaten/kota.

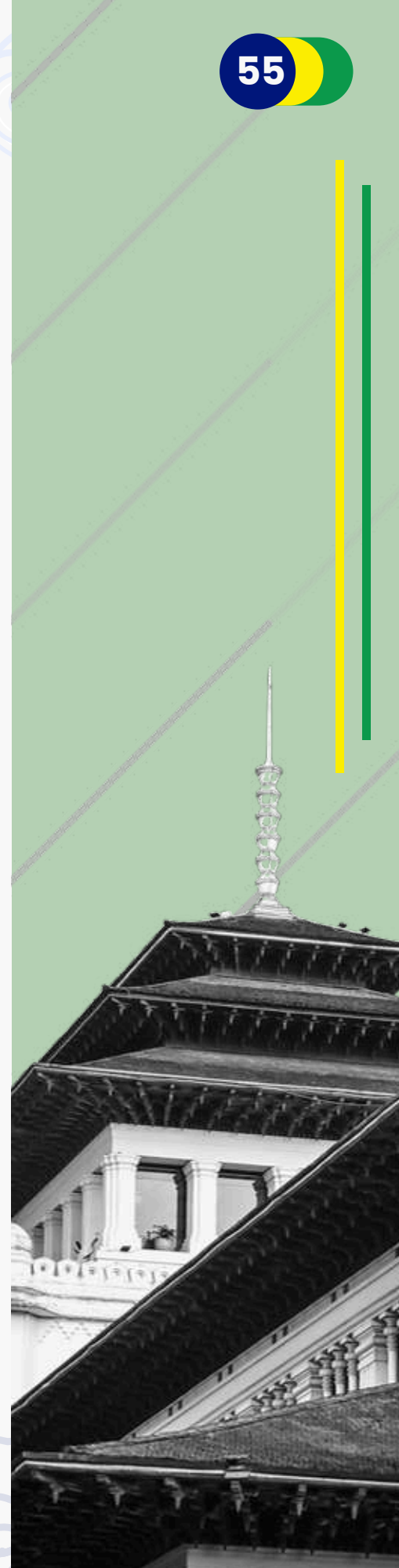
Program yang mendukung pencapaian Meningkatnya Efektivitas Dukungan Kebijakan terhadap Pembangunan adalah Program Kesejahteraan Rakyat, Program Perekonomian dan Pembangunan, Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan. Analisis mendalam dan rinci tentang program yang mendukung pencapaian Meningkatnya Efektivitas Dukungan Kebijakan terhadap Pembangunan tergambar dalam faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Efisiensi anggaran atas pencapaian sasaran strategis di atas sebesar 0,87% atau setara Rp1.863.122.929,34. Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp214.340.719.792,00 dan terealisasi sebesar Rp212.477.596.862,66.



E3ABAE3288

Berdasarkan pembahasan sasaran strategis di atas, indikator kinerja tercapai. Indikator Nilai Kualitas Kebijakan Daerah tercapai sebesar 105,88%. Oleh karena itu, kinerja sasaran Meningkatnya Efektivitas Dukungan Kebijakan terhadap Pembangunan tercapai.



E3ABAE3288

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>

SASARAN 6

Kinerja Perangkat Daerah Mencapai Target



Persentase Perangkat Daerah dengan Deviasi Kinerja $\geq 0\%$

Capaian 2025 144,28% Target: 63,28% Realisasi: 91,30%		Perbandingan dengan tahun sebelumnya Realisasi 2024: 63,04% Peningkatan Realisasi: 28,26% Capaian 2024: N/A Peningkatan Capaian: N/A		Perbandingan dengan target akhir Renstra Target 2030: 64,45% Capaian terhadap Renstra: 141,65%	
		Efisiensi anggaran 0,21% Rp320.975,00		Perbandingan dengan rata-rata nasional Tidak dapat diperbandingkan	

Faktor-faktor yang Mendorong Keberhasilan
 Meningkatnya kesesuaian progres kinerja perangkat daerah dengan perencanaan

Rekomendasi penyesuaian target Tahun 2026



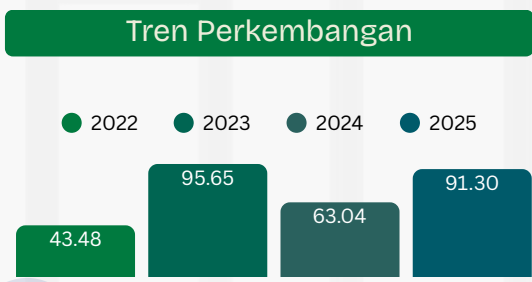
Upaya perbaikan intervensi (continuous improvement)

- Penyusunan 12 dokumen analisis capaian kinerja perangkat daerah
- Pemantauan kinerja pada 38 perangkat daerah



Program terkait:

Program Kebijakan Administrasi Pembangunan



Formulasi Persentase Perangkat Daerah dengan Deviasi Kinerja $\geq 0\%$
 Merupakan indikator yang menilai keberhasilan dan efektivitas kinerja seluruh perangkat daerah atau unit kerja pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Deviasi kinerja merujuk kepada perbedaan antara realisasi dengan target kinerja yang direncanakan yang menjadi dasar evaluasi capaian. Kinerja diukur dengan menggunakan formula: jumlah perangkat daerah yang memiliki deviasi sama dengan di atas 0 persen dibagi jumlah total perangkat daerah dikali 100 persen



Kinerja perangkat daerah mencapai target. Hal ini ditandai oleh Persentase Perangkat Daerah dengan Deviasi Kinerja $\geq 0\%$ mencapai 144,28% dari target yang ditetapkan sebesar 63,28% dan terealisasi sebesar 91,30%. Realisasi kinerja Persentase Perangkat Daerah dengan Deviasi Kinerja $\geq 0\%$ sebesar 91,30% mencerminkan mayoritas perangkat daerah (34 perangkat daerah) memiliki kinerja sangat baik dan melebihi ekspektasi, serta melakukan pengendalian kinerja secara efektif.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari segi realisasi, Persentase Perangkat Daerah dengan Deviasi Kinerja $\geq 0\%$ meningkat sebesar 28,26% dari realisasi tahun 2024 sebesar 63,04% dan pada tahun 2025 menjadi 91,30%. Namun dari segi capaian kinerja, Persentase Perangkat Daerah dengan Deviasi Kinerja $\geq 0\%$ merupakan indikator kinerja yang baru digunakan pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029, sehingga indikator ini tidak ditargetkan pada Rencana Kerja Tahun 2024 dan dengan demikian tidak dapat dibandingkan.

Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, realisasi Persentase Perangkat Daerah dengan Deviasi Kinerja $\geq 0\%$ Tahun 2025 menunjukkan lebih tinggi sebesar 17,93%, yaitu dari rata-rata realisasi tahun 2022-2025 sebesar 73,37% dan realisasi tahun 2025 sebesar 91,30%. Sedangkan rata-rata kenaikan Persentase Perangkat

Daerah dengan Deviasi Kinerja $\geq 0\%$ dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 sebesar 19,02%.

Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, kinerja Persentase Perangkat Daerah dengan Deviasi Kinerja $\geq 0\%$ telah mencapai batas aman Renstra yaitu sebesar 141,65% dari target 64,45% dan terealisasi sebesar 91,30%. Untuk indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah dengan Deviasi Kinerja $\geq 0\%$ tidak dapat dibandingkan dengan Nasional maupun Pemerintah Daerah di Pulau Jawa karena indikator ini hanya diukur oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Faktor yang mendorong keberhasilan pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Mencapai Target yaitu Progres kinerja perangkat Daerah sesuai Perencanaan yang ditandai dengan Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti Rekomendasi akselerasi Kinerja sebesar 100% atau sebanyak 38 Perangkat Daerah. Progres kinerja perangkat Daerah sesuai Perencanaan didorong oleh Meningkatnya Pengendalian Kinerja Program Pembangunan sebesar 100% atau sebanyak 4 dokumen.

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mencapai Kinerja Perangkat Daerah Mencapai Target melalui Progres kinerja perangkat Daerah sesuai Perencanaan yang diintervensi oleh program Perekonomian dan Pembangunan antara lain penyusunan analisis perkembangan pelaksanaan



E3ABAE3288



Desk Evaluasi Capaian Kinerja Semester II Tahun 2025, 24-26 November 2025

proyek strategis provinsi sebanyak 3 laporan, penyusunan analisis capaian kinerja perangkat daerah sebanyak 3 laporan, penyusunan laporan realisasi fisik bantuan keuangan provinsi kepada kabupaten/kota sebanyak 1 laporan, dan pemantauan kinerja perangkat daerah sebanyak 38 Perangkat Daerah.

Dalam rangka mengakselerasi kinerja Persentase Perangkat Daerah dengan Deviasi Kinerja $\geq 0\%$ Tahun 2026, maka perlu dilakukan perubahan target disertai dengan intervensinya. Adapun perubahan target yang direkomendasikan pada tahun 2026 adalah lebih dari 91,30% yaitu dari target tahun 2026 sebesar 65,31% sudah terlampaui oleh realisasi tahun 2025 sebesar 91,30%. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan upaya-upaya peningkatan kinerja tahun 2026 yaitu:

Dalam rangka mengakselerasi kinerja Persentase Perangkat Daerah dengan Deviasi Kinerja $\geq 0\%$ Tahun 2026, maka perlu dilakukan perubahan target disertai dengan intervensinya. Adapun perubahan target yang direkomendasikan pada tahun 2026 adalah lebih dari 91,30% yaitu dari target tahun 2026 sebesar 65,31% sudah terlampaui oleh realisasi tahun 2025 sebesar 91,30%. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan upaya-upaya peningkatan kinerja tahun 2026 yaitu:

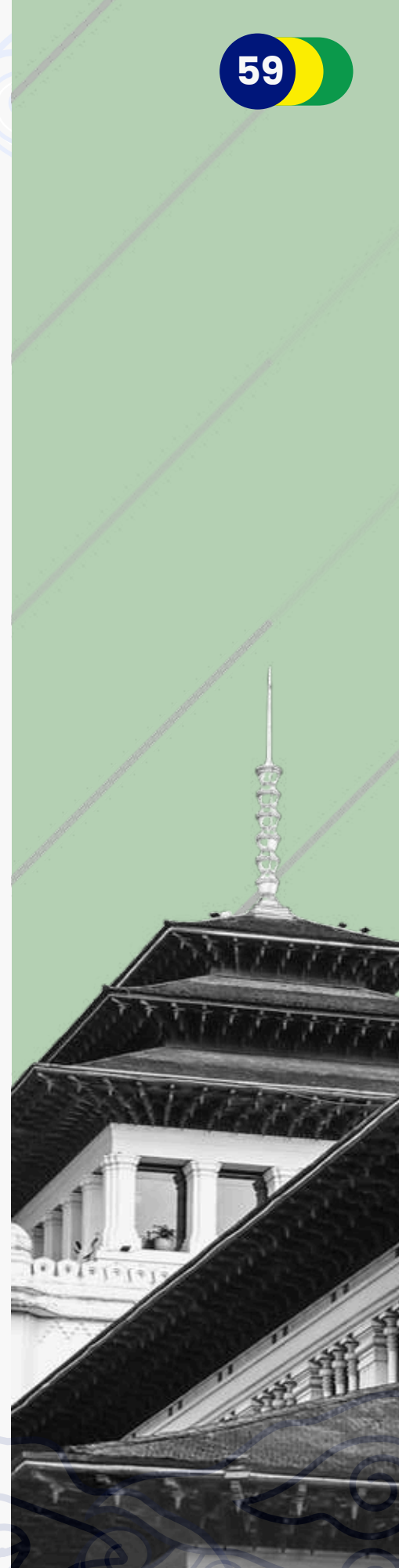
- 1) Penyusunan 1 dokumen realisasi fisik bantuan keuangan provinsi kepada kabupaten/kota.
- 2) Penyusunan 12 dokumen analisis capaian kinerja perangkat daerah
- 3) Penyusunan 12 dokumen analisis perkembangan pelaksanaan proyek strategis provinsi
- 4) Pemantauan kinerja pada 38 perangkat daerah



Program yang mendukung pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Mencapai Target adalah Program Kebijakan Administrasi Pembangunan. Analisis mendalam dan rinci tentang program yang mendukung pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Mencapai Target tergambar dalam faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Efisiensi anggaran atas capaian Kinerja Perangkat Daerah Mencapai Target adalah 0,21% atau setara Rp320.975,00. Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp152.034.875,00 dan terealisasi sebesar Rp151.713.900,00.

Berdasarkan pembahasan sasaran di atas, indikator kinerja tercapai. Indikator Persentase Perangkat Daerah dengan Deviasi Kinerja $\geq 0\%$ tercapai sebesar 144,28%. Oleh karena itu, kinerja dari sasaran Kinerja Perangkat Daerah Mencapai Target tercapai.



E3ABAE3288

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>

SASARAN 7

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa



Indeks Tata Kelola Pengadaan

Capaian 2025 109,03% Target: 90,30 poin Realisasi: 98,45 poin	Perbandingan dengan tahun sebelumnya Realisasi 2024: 90,29 poin Peningkatan Realisasi: 8,16 poin Capaian 2024: 110,37% Penurunan Capaian: 1,46% Efisiensi anggaran 5,35% Rp223,355,158,00	Perbandingan dengan target akhir Renstra Target 2030: 90,35 poin Capaian terhadap Renstra: 108,97%	Perbandingan dengan rata-rata nasional Rata-Rata Nasional: 81,12 poin Lebih Tinggi: 17,33 poin
--	--	---	---

Faktor-faktor yang Mendorong Keberhasilan

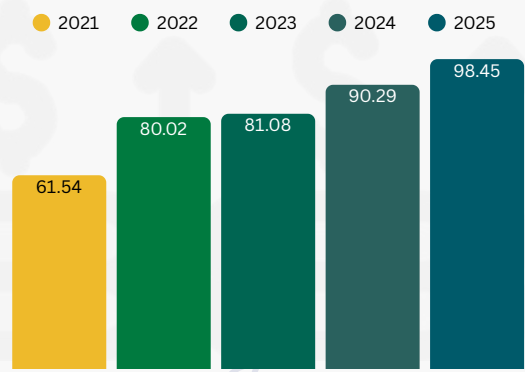
Meningkatnya kapabilitas tata kelola unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ)



Rekomendasi penyesuaian target Tahun 2026

Tren Perkembangan

Realisasi 2025: 98,45 poin | Target 2026: 90,31 poin | **> 98,45 poin**



Upaya perbaikan intervensi (continuous improvement)

- Pendampingan katalog lokal bagi 100 pelaku pengadaan
- Pemantauan pelaksanaan 10 kontrak
- Penyusunan 12 kajian hasil evaluasi variabel tingkat kematangan UKPBJ PKP Pro Aktif

Program terkait:

Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Formulasi Indeks Tata Kelola Pengadaan

Merupakan indikator yang memperlihatkan tingkat tata kelola pengadaan dalam level operasional sebagai salah satu pengukuran penyelenggaraan reformasi birokrasi dalam aspek 'antara'. Klasifikasi ditandai dengan kategori: kurang, cukup, baik, sangat baik, dan istimewa. Kinerja diukur dengan menggunakan formula: penjumlahan bobot komponen pembangun yang terdiri dari pemanfaatan sistem pengadaan, kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ, serta tingkat kematangan UKPBJ



Kualitas tata Kelola pengadaan barang dan jasa meningkat. Hal ini ditandai oleh Indeks Tata Kelola Pengadaan yang kinerjanya mencapai 109,03% dari target yang ditetapkan sebesar 90,30 poin dan terealisasi sebesar 98,45 poin. Realisasi kinerja Indeks Tata Kelola Pengadaan sebesar 98,45 poin berarti menunjukkan bahwa indikator yang diukur dalam tingkat operasional baik dari segi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan maupun dari segi pemanfaatan sistem pengadaan mencapai poin yang baik.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari segi realisasi, Indeks Tata Kelola Pengadaan meningkat sebesar 8,16 poin dari realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 sebesar 90,29 poin dan pada tahun 2025 menjadi 98,45 poin. Sedangkan dari segi capaian kinerja, Indeks Tata Kelola Pengadaan mengalami penurunan sebesar 1,46% dari tahun sebelumnya yaitu Tahun 2024 sebesar 110,37% dan Tahun 2025 mencapai 108,90%.

Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, realisasi Indeks Tata Kelola Pengadaan Tahun 2025 ini lebih tinggi sebesar 8,16 poin yaitu dari rata-rata realisasi tahun 2020-2024 sebesar 78,28 poin dan realisasi tahun 2024 sebesar 90,29 poin. Mulai Tahun 2021 hingga Tahun 2024 rata-rata peningkatan Indeks Tata Kelola Pengadaan sebesar 9,57 poin.

Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, Indeks Tata Kelola Pengadaan telah mencapai batas aman dari target akhir Renstra yaitu sebesar 108,97% dari target 90,35 poin. Adapun pada level nasional, Indeks Tata Kelola Pengadaan Provinsi Jawa Barat berada pada peringkat ke 1 nasional dan posisinya lebih tinggi 17,33 poin dari rata-rata nasional sebesar 81,12 poin.

Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan pencapaian Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yaitu meningkatnya kapabilitas tata kelola UKPBJ yang ditandai dengan tingkat kematangan UKPBJ sebesar 3 poin atau sebanyak 12 dokumen. Realisasi ini menggambarkan bahwa UKPBJ Provinsi Jawa Barat yang diampu oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat berkinerja baik dan profesional, dalam artian pengadaan barang/jasa sudah efektif, transparan, akuntabel dan sesuai standar nasional. Meningkatnya Kapabilitas Tata Kelola UKPBJ didukung oleh pertama, layanan pengadaan secara elektronik sesuai standar sebesar 100% atau sebanyak 12 dokumen. Kedua, meningkatnya kualitas layanan advokasi pengadaan barang dan jasa sebesar 100% atau sebanyak 12 dokumen. Ketiga, meningkatnya kapasitas kelembagaan pengadaan barang dan jasa sebesar 3 poin atau sebanyak 12 dokumen.



E3ABAE3288

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>



Sosialisasi Katalog Elektronik Versi 6, 21 Agustus 2025

Keempat, proses pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan sebesar 100% atau sebanyak 12 dokumen.

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mencapai Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa melalui meningkatnya kapabilitas tata kelola UKPBJ yang diintervensi oleh Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah antara lain pendokumentasian 12 laporan data pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan sistem informasi pengadaan barang/jasa sebanyak 12 Dokumen sistem informasi, penyampaian informasi pengadaan barang/jasa dalam kanal informasi publik sebanyak 48 informasi, pelayanan permohonan registrasi dan verifikasi akun 375 penyedia/akun pelaku usaha secara elektronik, pelayanan 721 pengaduan pengadaan barang/jasa secara elektronik,

pembangunan 2 fitur monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa, pendampingan 250 pelaku pengadaan dalam proses pengadaan barang dan jasa, pembinaan 128 SDM PBJ tentang peraturan berlaku, penyusunan 12 kajian hasil evaluasi variabel tingkat kematangan UKPBJ PKP Proaktif, pemantauan pelaksanaan 10 kontrak, pemantauan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan sebanyak 12 dokumen pemantauan, pelayanan 46 usulan pengadaan barang dan jasa perangkat daerah, penyusunan 12 dokumen strategi pengadaan barang/jasa, dan pendampingan 100 pelaku pengadaan tentang katalog elektronik lokal.

Dalam rangka mengakselerasi kinerja Indeks Tata Kelola Pengadaan Tahun 2026, maka perlu dilakukan perubahan target disertai dengan intervensinya. Adapun perubahan target yang direkomendasikan pada tahun 2026 adalah lebih dari 98,45 poin yaitu dari target tahun 2026 sebesar 90,30 poin



E3ABAE3288

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>

SASARAN 8 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Jawa Barat



Indeks Pelayanan Publik

Capaian 2025 97,27% Target: 4,76 poin Realisasi: 4,63 poin	Perbandingan dengan tahun sebelumnya Realisasi 2024: 4,76 poin Penurunan Realisasi: 0,13 poin Capaian 2024: N/A Peningkatan Capaian: N/A Tidak ada efisiensi anggaran	Perbandingan dengan target akhir Renstra Target 2030: 4,79 poin Capaian terhadap Renstra: 96,66%	Perbandingan dengan rata-rata nasional Rata-Rata Nasional: 3,62 poin Lebih Tinggi: 1,01 poin
---	--	---	---

Faktor-faktor yang Menyebabkan Kegagalan

kualitas pelayanan publik pada lokus penilaian belum dianggap baik.



Rekomendasi penyesuaian target Tahun 2026

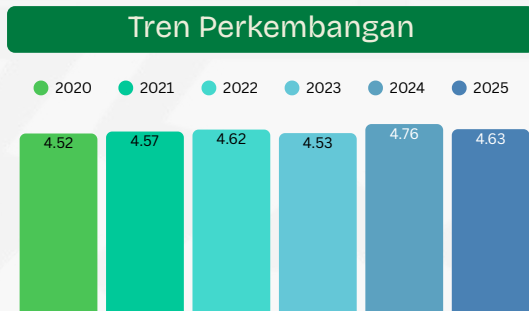


Upaya perbaikan intervensi (continuous improvement)

- Advokasi kepada 38 perangkat daerah terkait penilaian PEKPPP khusus dan ombudsman RI;
- Penilaian PEKPPP perangkat daerah provinsi pada 38 perangkat daerah; serta
- Pemantauan penerapan aplikasi SKM terintegrasi pada 38 perangkat daerah

Program terkait:

Program Penataan Organisasi



Formulasi Indeks Pelayanan Publik

Merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan rangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kinerja diukur dengan menggunakan formula: penjumlahan atas penilaian evaluator dan penilaian dari pengguna layanan yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, SKM, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi



Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Jawa Barat. Hal ini ditandai oleh capaian Indeks Pelayanan Publik sebesar 97,27% dari target sebesar 4,76 poin dan terealisasi sebesar 4,63 poin.

Jika dibandingkan tahun lalu, dilihat dari aspek realisasi, Indeks Pelayanan Publik menurun sebesar 0,13 poin dari realisasi tahun 2024 sebesar 4,76 poin dan pada tahun 2025 menjadi 4,63 poin. Namun dari segi capaian kinerja, Indeks Pelayanan Publik merupakan indikator kinerja yang baru digunakan pada Rencana Strategis Tahun 2025–2029, sehingga indikator ini tidak ditargetkan pada Rencana Kerja Tahun 2024 dan dengan demikian tidak dapat dibandingkan.

Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, realisasi Indeks Pelayanan Publik di tahun 2025 lebih tinggi 0,03 poin yaitu dari rata-rata realisasi tahun 2020–2024 sebesar 4,60 poin dan realisasi tahun 2025 sebesar 4,63 poin.

Dari segi perencanaan jangka menengah, Indeks Pelayanan Publik belum mencapai batas aman yaitu mencapai 96,66% dari target sebesar 4,79 poin di tahun 2030 dan realisasi 4,63 poin di tahun 2025. Bila dibandingkan dengan nasional,

Indeks Pelayanan Publik lebih tinggi 1,01 poin dari rata-rata nasional sebesar ,62 poin dan terealisasi pada tahun

2025 sebesar 4,63 poin. Menempatkan Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berada pada peringkat ke tujuh secara nasional. Bila dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Jawa, Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat lebih rendah 0,02 poin dari rata-rata Indeks Pelayanan Publik provinsi di pulau Jawa sebesar 4,65 poin, menempatkan Indeks Pelayanan Publik kedua terendah di pulau Jawa.

Faktor yang mendukung pencapaian Indeks Pelayanan Publik adalah Pelayanan publik perangkat daerah yang memenuhi ekspektasi masyarakat yang ditandai dengan persentase perangkat daerah provinsi dengan nilai IKM minimal Sangat Baik sebanyak 37 perangkat daerah. Pelayanan publik perangkat daerah yang memenuhi ekspektasi masyarakat didukung oleh pelayanan publik perangkat daerah memenuhi standar yang ditandai dengan persentase perangkat daerah yang memenuhi standar pelayanan sebesar 100%.

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mencapai kinerja Pelayanan publik perangkat daerah yang memenuhi ekspektasi masyarakat yang diintervensi oleh Program Penataan Organisasi adalah pembangunan aplikasi penilaian PEKPPP di aplikasi surabi sebanyak 1 fitur, pemantauan penerapan aplikasi SKM terintegrasi di 38 perangkat daerah, pelaksanaan PEKPPP mandiri



E3ABAE3288



Sosialisasi pengukuran IPP Mandiri di app Surabi kepada OPD di Kab Purwakarta

pada perangkat daerah provinsi sebanyak 38 perangkat daerah, advokasi perangkat daerah untuk penilaian kinerja pelayanan publik sebanyak 38 perangkat daerah, evaluasi penerapan standar pelayanan di 27 kabupaten/kota.

Program yang mendukung pencapaian Indeks Pelayanan Publik beserta faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilannya meliputi dua program yaitu Program Penataan Organisasi dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Analisis mendalam dan rinci tentang program yang mendukung keberhasilan tergambar dalam faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan sebagaimana sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Efisiensi anggaran atas pencapaian Indeks Pelayanan Publik tidak dapat dianalisis. Hal ini disebabkan karena Hal ini disebabkan karena indikator Indeks Pelayanan Publik tidak mencapai target.

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kegagalan Indeks Pelayanan Publik dan Upaya Perbaikan di Tahun 2026

Faktor yang menyebabkan kegagalan pencapaian Indeks Pelayanan Publik adalah kualitas pelayanan publik pada lokus penilaian belum dianggap baik. Tantangan yang biasa terjadi dalam pelaksanaan pelayanan publik, diantaranya: ketersediaan SDM yang kompeten serta keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik,



E3ABAE3288

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>

perbedaan kualitas pelayanan publik masih sangat bervariasi terutama yang infrastrukturnya belum memadai. Ditambah tidak semua instansi pemerintah memiliki kapasitas untuk mengadopsi teknologi terbaru dalam pelaksanaan layanan publik.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan di 2026 adalah dengan melakukan penguatan tata kelola pelayanan publik melalui penyempurnaan Katalog Layanan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Katalog ini disusun menggunakan konsep taksonomi layanan yang mengacu pada berbagai best practice dalam pengelolaan katalog pelayanan publik. Penyusunannya tidak dimulai dari awal, melainkan kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, sehingga pada tahun berjalan fokus diarahkan pada penyempurnaan data serta pemanfaatannya sebagai basis data layanan publik dalam mendukung penataan proses bisnis, standar pelayanan, dan kebijakan kelembagaan.

Berdasarkan katalog tersebut, dilakukan pendampingan penyusunan dan penyempurnaan Standar Pelayanan serta pengukuran kualitas layanan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Pelaksanaan SKM diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan dengan pendekatan customer-centric, dimana Perangkat

Daerah melakukan perbaikan layanan berdasarkan masukan langsung dari pengguna. Selain itu, Perangkat Daerah secara rutin menyampaikan laporan tindak lanjut atas rapor SKM yang diterbitkan oleh Biro Organisasi sebagai dasar perbaikan layanan secara berkelanjutan.

Selanjutnya, Biro Organisasi mengintensifkan asistensi pemenuhan komponen penilaian Indeks Pelayanan Publik, khususnya pada PD yang berpotensi menjadi lokus penilaian. Pemenuhan ini pada dasarnya lebih banyak berkaitan dengan kelengkapan administrasi, sehingga secara langsung tidak selalu berdampak signifikan terhadap kualitas pelayanan publik sesungguhnya. Namun demikian, apabila fondasi pelayanan seperti katalog, standar pelayanan, dan mekanisme SKM telah tersedia, proses pemenuhan penilaian dapat dilakukan secara lebih intensif, sekaligus memperkuat tata kelola pelayanan publik secara bertahap dan berkelanjutan.

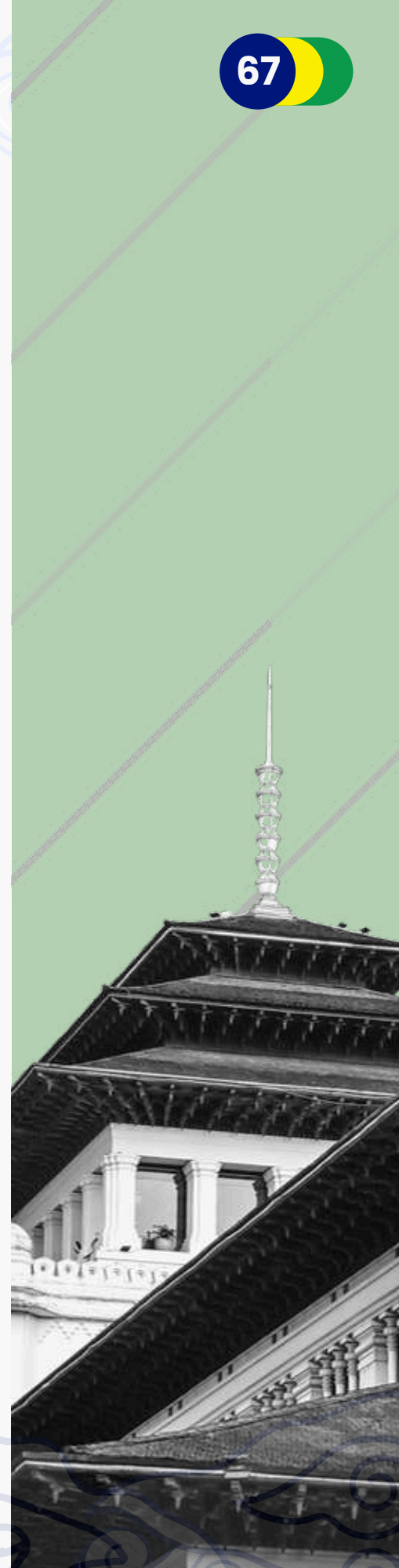
Adapun upaya peningkatan kinerja yang akan dilakukan untuk memperbaiki kinerja Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Jawa Barat di Tahun 2026, antara lain:

- 1) Advokasi kepada 38 perangkat daerah terkait penilaian PEKPPP khusus dan ombudsman RI;
- 2) Penilaian PEKPPP perangkat daerah provinsi pada 38 perangkat daerah; serta



3) Pemantauan penerapan aplikasi SKM terintegrasi pada 38 perangkat daerah.

Berdasarkan pembahasan sasaran di atas, seluruh indikator kinerja tidak tercapai. Indikator Indeks Pelayanan Publik tidak tercapai sebesar 97,27%. Oleh karena itu, kinerja dari sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Jawa Barat tidak tercapai.



E3ABAE3288

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>

SASARAN 9 Kelembagaan Agile



Nilai Evaluasi Kelembagaan

Capaian 2025

100%

Target	Realisasi
68,450 poin	68,450 poin

Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Realisasi 2024	Penurunan/Peningkatan Realisasi
68,450 poin	0
Capaian 2024	Peningkatan Capaian
N/A	N/A

Perbandingan dengan target akhir Renstra

Target 2030	Capaian terhadap Renstra
79,598 poin	85,99%

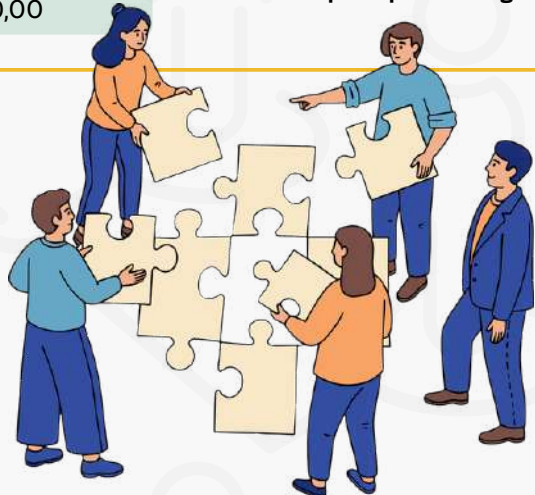
Perbandingan dengan rata-rata nasional

Tidak dapat diperbandingkan

Efisiensi anggaran 0,01%
Rp43.899,00

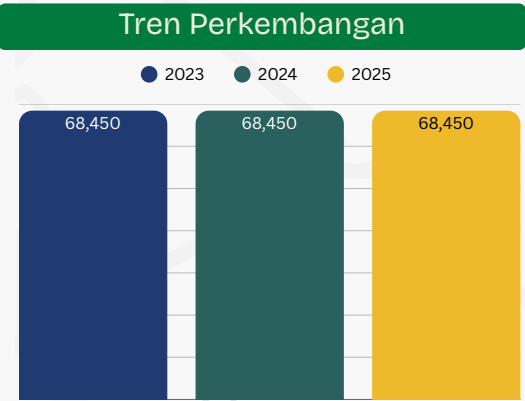
Faktor-faktor yang Mendorong Keberhasilan

- Kelembagaan tepat ukuran dan tepat fungsi
- Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tepat proses



Rekomendasi penyesuaian target Tahun 2026

Realisasi 2025	Target 2026	Target Tetap
68,450 poin	73,093 poin	



Upaya perbaikan intervensi (continuous improvement)

- Penyusunan 1 dokumen identifikasi dan analisa rincian fungsi
- Penyusunan 1 dokumen proses bisnis pemerintahan provinsi dan perangkat daerah

Program terkait:
Program Penataan Organisasi

Formulasi Nilai Evaluasi Kelembagaan

Merupakan indikator yang menilai efektivitas struktur dan proses organisasi instansi pemerintah dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi, dengan mempertimbangkan aspek kompleksitas, formalisasi, sentralisasi, keselarasan, tata kelola, perbaikan proses, manajemen risiko, dan teknologi informasi. Kinerja diukur dengan menggunakan formula: penjumlahan atas dimensi pembangun yaitu dimensi struktur organisasi dan dimensi proses organisasi



Kelembagaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat agile. Hal ini ditandai oleh kinerja Nilai Evaluasi Kelembagaan mencapai 100% dari target 68,450 poin dan terealisasi sebesar 68,450 poin. Realisasi kinerja Nilai Evaluasi Kelembagaan sebesar 68,450 poin mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, angka ini menunjukkan bahwa struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marjinal.

Jika dibandingkan dengan tahun 2024, dari segi realisasi, Nilai Evaluasi Kelembagaan tetap sama sebesar 68,450 poin. Namun dari segi capaian kinerja, Nilai Evaluasi Kelembagaan merupakan indikator kinerja yang baru digunakan pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029, sehingga indikator ini tidak ditargetkan pada Rencana Kerja Tahun 2024 dan dengan demikian tidak dapat dibandingkan.

Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, realisasi Nilai Evaluasi Kelembagaan ini menunjukkan angka yang sama sebesar 68,450, yaitu dari rata-rata realisasi tahun 2023-2024 sebesar 68,450 poin dan realisasi tahun 2024 sebesar 68,450 poin. Capaian yang sama ini dikarenakan berdasarkan Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2018, pelaksanaan evaluasi kelembagaan dilaksanakan setiap 3 tahun sekali dan Provinsi Jawa Barat baru melaksanakannya pada tahun 2023. Sehingga capaian nilai evaluasi kelembagaan 2023 s.d. 2025 masih tetap sama, hingga dilakukan penilaian evaluasi kelembagaan di tahun 2026.

Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, kinerja Nilai Evaluasi Kelembagaan telah mencapai batas aman dari target akhir Renstra yaitu sebesar 85,99% dari target 79,598 poin. Untuk perbandingan data nasional, Nilai Evaluasi Kelembagaan Provinsi Jawa Barat ini tidak bisa disandingkan dikarenakan tidak ada rilis data resmi.

Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan Nilai Evaluasi Kelembagaan adalah:

- 1) Kelembagaan tepat ukuran dan tepat fungsi, yang ditandai dengan nilai evaluasi kelembagaan dimensi struktur sebesar 37,378 poin. Kondisi ini dipengaruhi oleh pertama, struktur dan tupoksi sesuai dengan ketentuan pedoman penataan kelembagaan



E3ABAE3288



FGD verifikasi dan validasi pemetaan urusan pemerintahan bidang PUPR, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 18 September 2025

sebesar 84,21% atau sebanyak 32 perangkat daerah sudah sesuai dengan struktur dan tupoksi yang sesuai dengan ketentuan pedoman penataan kelembagaan. Kedua, jabatan sesuai kebutuhan sebesar 100% atau sebanyak 38 perangkat daerah telah mengusulkan usulan penyesuaian jabatan dan telah ditindaklanjuti. Ketiga, seluruh usulan kelembagaan kabupaten/kota ditindaklanjuti melalui penyampaian 58 rekomendasi penataan kelembagaan.

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mencapai kinerja Kelembagaan Agile melalui ketepatan ukuran dan fungsi kelembagaan yang diintervensi oleh Program Penataan Organisasi, adalah penyusunan kajian susunan dan kedudukan perangkat daerah Provinsi Jawa Barat sebanyak 1 dokumen, penyusunan kajian tupoksi perangkat daerah sebanyak 1 dokumen, penyusunan kajian pembentukan perangkat daerah sebanyak 1 dokumen, penyusunan kajian jabatan kritikal

sebanyak 1 dokumen, penyusunan dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja sebanyak 1 dokumen, penyusunan dokumen kajian penataan kelembagaan kabupaten/kota melalui kegiatan Forsesdasi sebanyak 1 dokumen, pelayanan usulan rekomendasi penataan kelembagaan kabupaten/kota sebanyak 58 rekomendasi penataan kelembagaan, penyusunan dokumen maturitas kelembagaan kabupaten/kota sebanyak 27 dokumen, serta penyusunan dokumen evaluasi kelembagaan kabupaten/kota berdasarkan Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 sebanyak 1 dokumen.

2) Organisasi tepat proses yang ditandai dengan Nilai Evaluasi Kelembagaan Dimensi Proses sebesar 31,071 poin. Ketercapaian ini dipengaruhi oleh, pertama, seluruh perangkat daerah atau sebanyak 38 perangkat daerah patuh terhadap kebijakan tatalaksana. Kedua, sebesar 21,05% atau sebanyak 8 perangkat daerah telah memiliki proses bisnis yang sesuai ketentuan arsitektur SPBE.

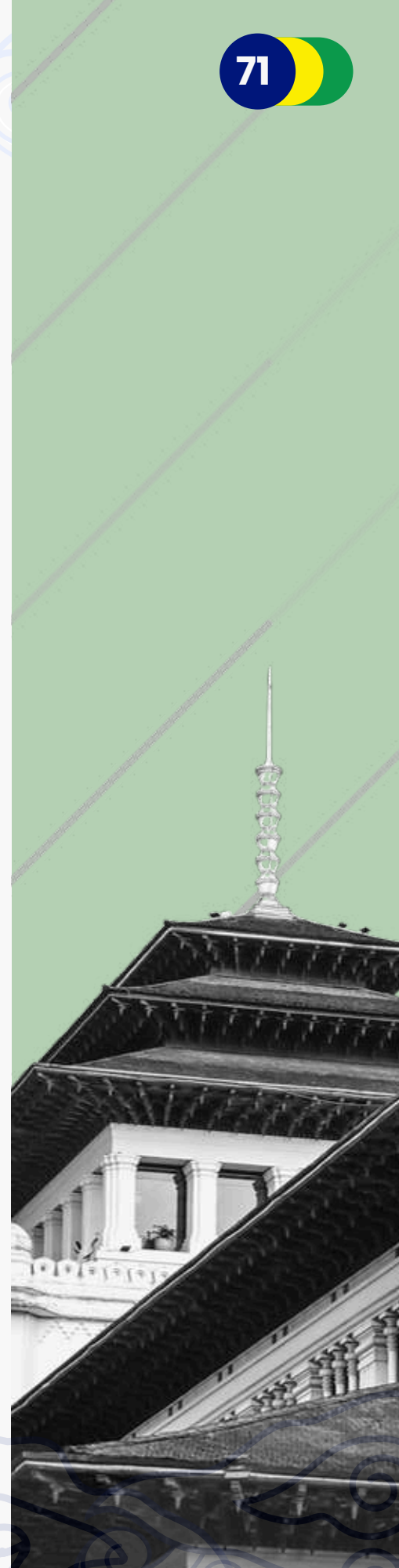


E3ABAE3288

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mencapai Kelembagaan Agile melalui ketepatan proses organisasi yang diintervensi oleh Program Penataan Organisasi, adalah monitoring pelaksanaan mekanisme kerja dinamis di 38 perangkat daerah, monitoring pelaksanaan tim kerja di 38 perangkat daerah, pembinaan ketatalaksanaan pemerintah kepada 15 kabupaten/kota, penyusunan kajian kebijakan pakaian dinas sebanyak 1 dokumen, sosialisasi kebijakan tata naskah dinas elektronik ke 38 perangkat daerah, penyusunan proses bisnis pemerintahan provinsi dan perangkat daerah berbasis SPBE sebanyak 1 dokumen.



E3ABAE3288

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>

SASARAN 10 Meningkatkan Praktik Baik Reformasi Birokrasi



Persentase Perangkat Daerah dengan IRB Kategori A

Capaian 2025

112,36%

Target	Realisasi
89%	100%

Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Realisasi 2024	Peningkatan Realisasi
86,84%	13,16%
Capaian 2024	Peningkatan Capaian
N/A	N/A

Efisiensi anggaran
Tidak ada efisiensi anggaran

Perbandingan dengan target akhir Renstra

Target 2030	Capaian terhadap Renstra
100%	100%

Perbandingan dengan rata-rata nasional
Tidak dapat diperbandingkan

Faktor-faktor yang Mendorong Keberhasilan

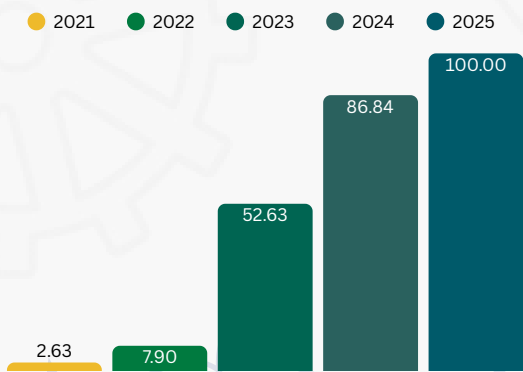
Meningkatnya kualitas tata kelola reformasi birokrasi perangkat daerah Provinsi Jawa Barat



Rekomendasi penyesuaian target Tahun 2026

Realisasi 2025	Target 2026	100%
100%	92,00%	

Tren Perkembangan



Upaya perbaikan intervensi (continuous improvement)

- Penyusunan 3 dokumen pedoman dan pelaporan pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026 melalui aplikasi SURABI;
- Penyusunan 2 dokumen rencana aksi dan pelaporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026 melalui aplikasi SURABI sebanyak 2 dokumen; serta
- Penyusunan 1 dokumen kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026 sebanyak 1 dokumen.

Program terkait:

Program Penataan Organisasi

Formulasi Persentase Perangkat Daerah dengan IRB Kategori A

Merupakan indikator yang mengukur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memperoleh hasil evaluasi IRB dengan kategori A (skor >80–90) terhadap total jumlah Perangkat Daerah di provinsi tersebut, berdasarkan hasil pengukuran yang dilaksanakan sesuai instrumen dan mekanisme dalam Keputusan Gubernur Nomor 060/Kep.194-Org/2025. Kinerja diukur dengan menggunakan formula: jumlah perangkat daerah yang memiliki IRB kategori A dibagi total jumlah perangkat daerah dikali 100 persen



Praktik Baik Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus meningkat. Hal ini ditandai oleh kinerja Persentase Perangkat Daerah dengan IRB Kategori A mencapai 112,36% dari target 89% dan terealisasi sebesar 100%. Realisasi kinerja Persentase Perangkat Daerah dengan IRB Kategori A sebesar 100% mencerminkan seluruh 38 perangkat daerah berhasil meraih predikat Minimal A (Memuaskan), bahkan 6 di antaranya meraih predikat AA (Istimewa). Tidak ada satu pun Perangkat Daerah yang tertinggal di bawah standar "Memuaskan" (Kategori A), menunjukkan pemerataan kualitas reformasi birokrasi telah merata di seluruh lini Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari segi realisasi, Persentase Perangkat Daerah dengan IRB Kategori A meningkat sebesar 13,16% dari realisasi tahun 2024 sebesar 86,84% dan pada tahun 2025 menjadi 100%. Namun dari segi capaian kinerja, Persentase Perangkat Daerah dengan IRB Kategori A merupakan indikator kinerja yang baru digunakan pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029, sehingga indikator ini tidak ditargetkan pada Rencana Kerja Tahun 2024 dan dengan demikian tidak dapat dibandingkan.

Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, realisasi Persentase

Perangkat Daerah dengan IRB Kategori A ini menunjukkan lebih tinggi sebesar 62,5%, yaitu dari rata-rata realisasi tahun 2020-2024 sebesar 37,5% dan realisasi tahun 2024 sebesar 86,84%. Sedangkan rata-rata kenaikan Persentase Perangkat Daerah dengan IRB Kategori A dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebesar 28,07%.

Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, kinerja Persentase Perangkat Daerah dengan IRB Kategori A telah mencapai batas aman dari target akhir Renstra yaitu sebesar 100% dari target 100%. Untuk perbandingan data nasional, Persentase Perangkat Daerah dengan IRB Kategori A ini tidak bisa disandingkan dikarenakan tidak ada rilis data resmi.

Faktor yang mendorong keberhasilan Persentase Perangkat Daerah dengan IRB Kategori A adalah meningkatnya kualitas tata kelola Reformasi Birokrasi yang ditandai dengan persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi Reformasi Birokrasi sebesar 100% atau sebanyak 38 perangkat daerah menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi Reformasi Birokrasi. Kondisi ini dipengaruhi oleh, pertama, seluruh perangkat daerah atau sebanyak 38 perangkat daerah menerapkan budaya kerja. Kedua, seluruh perangkat daerah atau sebanyak 38 perangkat



Praktik Baik Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus meningkat. Hal ini ditandai oleh kinerja Persentase Perangkat Daerah dengan IRB Kategori A mencapai 112,36% dari target 89% dan terealisasi sebesar 100%. Realisasi kinerja Persentase Perangkat Daerah dengan IRB Kategori A sebesar 100% mencerminkan seluruh 38 perangkat daerah berhasil meraih predikat Minimal A (Memuaskan), bahkan 6 di antaranya meraih predikat AA (Istimewa). Tidak ada satu pun Perangkat Daerah yang tertinggal di bawah standar "Memuaskan" (Kategori A), menunjukkan pemerataan kualitas reformasi birokrasi telah merata di seluruh lini Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari segi realisasi, Persentase Perangkat Daerah dengan IRB Kategori A meningkat sebesar 13,16% dari realisasi tahun 2024 sebesar 86,84% dan pada tahun 2025 menjadi 100%. Namun dari segi capaian kinerja, Persentase Perangkat Daerah dengan IRB Kategori A merupakan indikator kinerja yang baru digunakan pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029, sehingga indikator ini tidak ditargetkan pada Rencana Kerja Tahun 2024 dan dengan demikian tidak dapat dibandingkan.

Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, realisasi Persentase

Perangkat Daerah dengan IRB Kategori A ini menunjukkan lebih tinggi sebesar 62,5%, yaitu dari rata-rata realisasi tahun 2020-2024 sebesar 37,5% dan realisasi tahun 2024 sebesar 86,84%. Sedangkan rata-rata kenaikan Persentase Perangkat Daerah dengan IRB Kategori A dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebesar 28,07%.

Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, kinerja Persentase Perangkat Daerah dengan IRB Kategori A telah mencapai batas aman dari target akhir Renstra yaitu sebesar 100% dari target 100%. Untuk perbandingan data nasional, Persentase Perangkat Daerah dengan IRB Kategori A ini tidak bisa disandingkan dikarenakan tidak ada rilis data resmi.

Faktor yang mendorong keberhasilan Persentase Perangkat Daerah dengan IRB Kategori A adalah meningkatnya kualitas tata kelola Reformasi Birokrasi yang ditandai dengan persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi Reformasi Birokrasi sebesar 100% atau sebanyak 38 perangkat daerah menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi Reformasi Birokrasi. Kondisi ini dipengaruhi oleh, pertama, seluruh perangkat daerah atau sebanyak 38 perangkat daerah menerapkan budaya kerja. Kedua, seluruh perangkat daerah atau sebanyak 38 perangkat





Strategi IRB PD Di Dinas Pendidikan pada SURABI V3.0

daerah menerapkan kebijakan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Upaya peningkatan kinerja yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Meningkatkan Praktik Baik Reformasi Birokrasi di Tahun 2026, antara lain:

- 1) Penyusunan dokumen pedoman dan pelaporan pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026 melalui aplikasi SURABI sebanyak 3 dokumen;
- 2) Penyusunan dokumen rencana aksi dan pelaporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026 melalui aplikasi SURABI sebanyak 2 dokumen;
- 3) Advokasi kabupaten/kota dalam evaluasi Reformasi Birokrasi pada 27 kabupaten/kota;
- 4) Penyusunan dokumen kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026 sebanyak 1 dokumen;

5) Advokasi kabupaten/kota dalam pelaksanaan budaya bekerja berAKHLAK pada 27 kabupaten/kota; serta

6) Evaluasi budaya bekerja berAKHLAK di 38 perangkat daerah.

Program yang mendukung pencapaian Persentase Perangkat Daerah dengan IRB Kategori A adalah Program Penataan Organisasi. Analisis mendalam dan rinci tentang program yang mendukung pencapaian Persentase Perangkat Daerah dengan IRB Kategori A tergambar dalam faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Efisiensi anggaran atas pencapaian Persentase Perangkat Daerah dengan IRB Kategori A adalah 0% atau setara Rp0,00. Adapun kondisi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp184.369.303,00 dan terealisasi sebesar Rp184.369.303,00.



E3ABAE3288

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>

Berdasarkan pembahasan sasaran di atas, seluruh indikator kinerja tercapai. Indikator Persentase Perangkat Daerah dengan IRB Kategori A tercapai sebesar 112,36%. Oleh karena itu, kinerja dari sasaran Meningkatkan Praktik Baik Reformasi Birokrasi tercapai.



E3ABAE3288

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>

SASARAN 11 Pelaporan Kinerja Pemda Berdampak pada Akselerasi Kinerja Pembangunan

Nilai SAKIP Pemda Dimensi Pelaporan

Capaian 2025

100,96%

Target	Realisasi
13,58 poin	13,71 poin

Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Realisasi 2024	Peningkatan Realisasi
13,55 poin	0,16 poin
Capaian 2024	Peningkatan Capaian
N/A	N/A

Efisiensi anggaran

Tidak ada efisiensi anggaran

Perbandingan dengan target akhir Renstra

Target 2030	Capaian terhadap Renstra
13,74 poin	99,78%

Perbandingan dengan rata-rata nasional

Tidak dapat diperbandingkan

Faktor-faktor yang Mendorong Keberhasilan

- Meningkatnya kualitas tatakelola SAKIP
- Pelaporan kinerja berkualitas dan bermanfaat

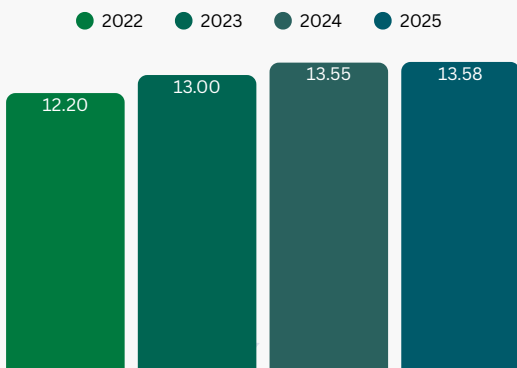


Rekomendasi penyesuaian target Tahun 2026

Realisasi 2025	Target 2026
13,71 poin	13,61 poin

> 13,71 poin

Tren Perkembangan



Upaya perbaikan intervensi (continuous improvement)

- Penyusunan 1 Rencana Aksi Peningkatan SAKIP Level Pemda tahun 2026 dan 2027;
- Pembangunan 1 fitur evaluasi SAKIP terintegrasi Kemen PAN RB; serta
- Rehabilitasi 1 fitur rencana aksi dan realisasi rencana aksi dalam satu display.

Program terkait:

Program Penataan Organisasi

Formulasi Nilai SAKIP Pemda Dimensi Pelaporan

Merupakan indikator yang mengukur mencerminkan capaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, khususnya pada dimensi pelaporan kinerja. Dimensi ini menilai sejauh mana dokumen laporan kinerja telah disusun dan diformalkan, menggambarkan pencapaian kinerja secara kuantitatif dan kualitatif, mempunyai nilai strategis dalam penyesuaian strategi/kebijakan di masa depan, telah digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, serta diperoleh dari evaluasi mendalam terhadap perencanaan, pengukuran, dan evaluasi internal kinerja. Kinerja diukur dengan menggunakan formula: penjumlahan terhadap skor total sub komponen pelaporan



E3ABAE3288

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>

Pelaporan Kinerja Pemda Berdampak pada Akselerasi Kinerja Pembangunan di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus meningkat. Hal ini ditandai oleh kinerja Nilai SAKIP Pemda Dimensi Pelaporan mencapai 100,96% dari target 13,58 poin dan terealisasi sebesar 13,71 poin. Realisasi kinerja Nilai SAKIP Pemda Dimensi Pelaporan sebesar 13,71 poin mencerminkan keberhasilan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi serta Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024, yang seluruhnya telah dipublikasikan melalui situs web resmi pemerintah daerah sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja serta keuangan. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja secara komprehensif, dilengkapi dengan data pembanding yang relevan, rekomendasi hasil evaluasi, serta analisis terhadap hambatan dan permasalahan yang dihadapi, yang disajikan dalam bentuk infografis, narasi, maupun tabel. Selain Laporan Kinerja Tahunan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menyusun Laporan Kinerja secara triwulanan dalam bentuk Rapor Kinerja Triwulanan. Laporan ini dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan, khususnya dalam penyempurnaan rencana aksi pada triwulan berikutnya. Baik Laporan Kinerja Tahunan maupun Laporan Kinerja Triwulanan telah

terintegrasi dalam aplikasi JAPATI, sehingga memudahkan proses penarikan data serta menjamin konsistensi dan validitas kinerja yang disajikan.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari segi realisasi, Nilai SAKIP Pemda Dimensi Pelaporan meningkat sebesar 0,16 poin dari realisasi tahun 2024 sebesar 13,55 poin dan pada tahun 2025 menjadi 13,71 poin. Namun dari segi capaian kinerja, Nilai SAKIP Pemda Dimensi Pelaporan merupakan indikator kinerja yang baru digunakan pada Rencana Strategis Tahun 2025–2029, sehingga indikator ini tidak ditargetkan pada Rencana Kerja Tahun 2024 dan dengan demikian tidak dapat dibandingkan.

Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, realisasi Nilai SAKIP Pemda Dimensi Pelaporan tahun 2025 sebesar 13,71 poin menunjukkan lebih tinggi sebesar 0,79 poin yaitu dari rata-rata realisasi tahun 2022–2024 sebesar 12,92 poin, dan lebih tinggi sebesar 0,16 poin dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar 13,55 poin. Sedangkan rata-rata kenaikan Nilai SAKIP Pemda Dimensi Pelaporan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sebesar 0,68 poin per tahun.

Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, kinerja Nilai SAKIP Pemda Dimensi Pelaporan telah mencapai batas aman dari target



akhir Renstra yaitu sebesar 99,78% dari target 13,74 poin. Untuk perbandingan data nasional, Nilai SAKIP Pemda Dimensi Pelaporan ini tidak bisa disandingkan dikarenakan tidak ada rilis data resmi.

Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan Nilai SAKIP Pemda Dimensi Pelaporan adalah:

1) Pelaporan kinerja berkualitas dan bermanfaat, yang ditandai dengan nilai pemenuhan, kualitas dan kebermanfaatan pelaporan kinerja sebesar 13,58 poin. Kondisi ini dipengaruhi persentase LKIP pemda dan perangkat daerah yang memenuhi standar tujuh informasi sebesar 100%.

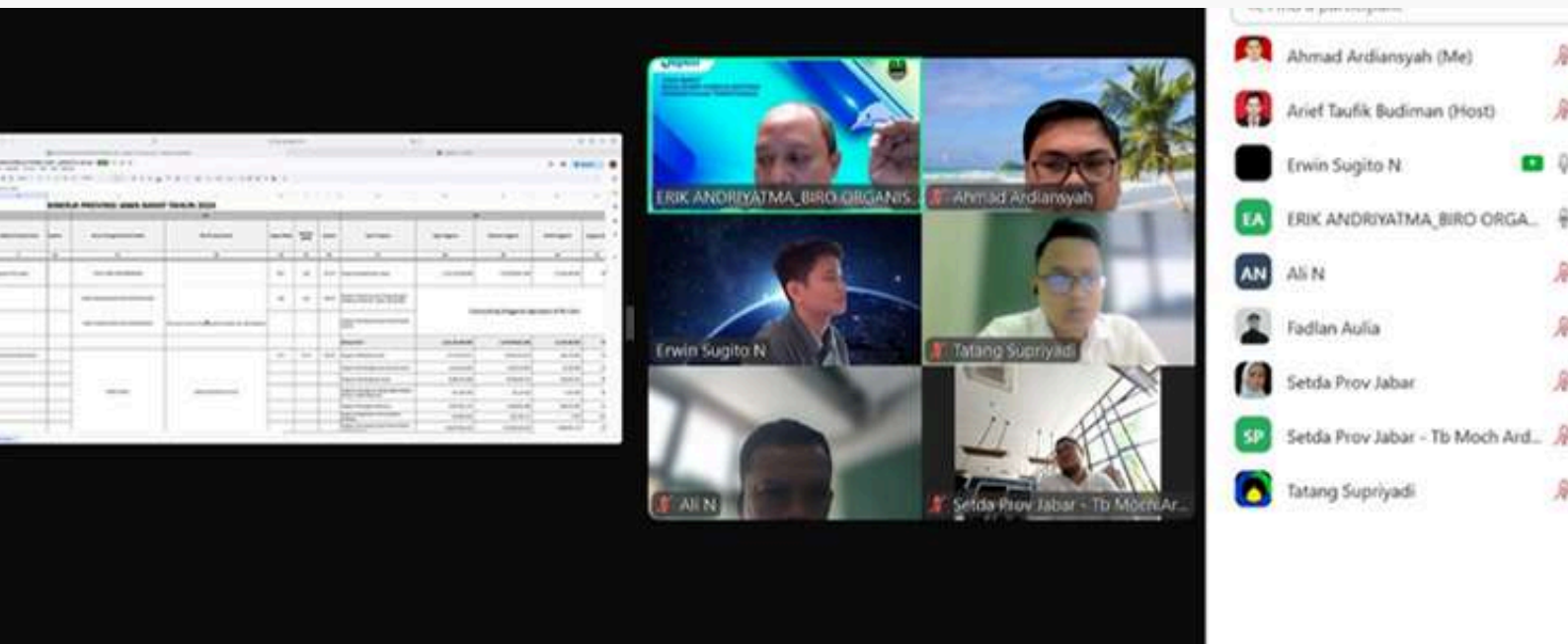
Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mencapai kinerja Pelaporan Kinerja Pemda Berdampak pada Akselerasi Kinerja Pembangunan

melalui Pelaporan kinerja berkualitas dan bermanfaat yang diintervensi oleh Program Penataan Organisasi, adalah menyusun LKIP Pemda tahun 2024 sebanyak 1 dokumen dan melakukan verifikasi dokumen LKIP perangkat daerah tahun 2024 sebanyak 38 dokumen.

2) Meningkatnya kualitas tata kelola SAKIP, yang ditandai dengan persentase tindak lanjut LHE SAKIP dari KemenPAN RB sebesar 100%. Kondisi ini dipengaruhi persentase komponen SAKIP yang terintegrasi sebesar 100%.

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mencapai kinerja Pelaporan Kinerja Pemda Berdampak pada Akselerasi Kinerja Pembangunan melalui Meningkatnya kualitas tata kelola SAKIP yang diintervensi oleh Program Penataan Organisasi, adalah membangun fitur cetak excel

Koordinasi Pembuatan LKIP Pemerintah Daerah, Zoom Meeting



E3ABAE3288

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>

cascading pada aplikasi Japati sebanyak 1 fitur, melakukan verifikasi dokumen penilaian SAKIP perangkat daerah sebanyak 38 dokumen, membangun Sistem Simplifikasi dashboard cascading ke fitur Pengukuran, Pelaporan, Evaluasi serta ke japati tematik pembangunan (PDN, Investasi, kemiskinan, Inflasi) sebanyak 1 sistem, menyusun Perjanjian Kinerja Gubernur Tahun 2025 sebanyak 2 dokumen, membangun Fitur Perjanjian Kinerja Perubahan sebanyak 1 fitur, melakukan verifikasi Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebanyak 38 dokumen, membangun Fitur Cascading 2025 Semester 2 sebanyak 1 fitur, melakukan verifikasi Dokumen Penilaian SAKIP Pemda sebanyak 1 dokumen, menyusun rencana aksi peningkatan SAKIP level pemda tahun 2025 dan 2026 sebanyak 1 rencana aksi, menyusun pedoman tata kelola akuntabilitas kinerja revisi sebanyak 1 dokumen, membangun fitur definisi operasional pada cascading sebanyak 1 fitur, serta membangun fitur cascading 2025 semester 1 sebanyak 1 fitur.

Upaya peningkatan kinerja yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Pelaporan Kinerja Pemda Berdampak pada Akselerasi Kinerja Pembangunan di Tahun 2026, antara lain:

- 1) Penyusunan LKIP pemda tahun 2025 sebanyak 1 dokumen;
- 2) Penyusunan Rencana Aksi peningkatan SAKIP Level Pemda tahun

2026 dan 2027 sebanyak 1 rencana aksi;

3) Penyusunan perjanjian kinerja gubernur tahun 2026 sebanyak 2 dokumen;

4) Pembangunan fitur evaluasi SAKIP terintegrasi Kemen PAN RB sebanyak 1 fitur; serta

5) Rehabilitasi fitur rencana aksi dan realisasi rencana aksi dalam satu display sebanyak 1 fitur.

Program yang mendukung pencapaian Nilai SAKIP Pemda Dimensi Pelaporan adalah Program Penataan Organisasi. Analisis mendalam dan rinci tentang program yang mendukung pencapaian Nilai SAKIP Pemda Dimensi Pelaporan tergambar dalam faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Efisiensi anggaran atas pencapaian Nilai SAKIP Pemda Dimensi Pelaporan adalah sebesar 0% atau setara dengan Rp0,00. Adapun kondisi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp123.167.521,00 dan terealisasi sebesar Rp123.167.521,00.

Berdasarkan pembahasan sasaran di atas, seluruh indikator kinerja tercapai. Indikator Nilai SAKIP Pemda Dimensi Pelaporan tercapai sebesar 100,96%. Oleh karena itu, kinerja dari sasaran Pelaporan Kinerja Pemda Berdampak pada Akselerasi Kinerja Pembangunan tercapai.



E3ABAE3288

SASARAN 12

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi

Capaian 2025

100%

Target	Realisasi
Kategori TINGGI	Kategori TINGGI

Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Realisasi 2024	Peningkatan Realisasi
N/A	N/A
Capaian 2024	Peningkatan Capaian
N/A	N/A

Efisiensi anggaran 5,01%
Rp499.566.829,66

Perbandingan dengan target akhir Renstra

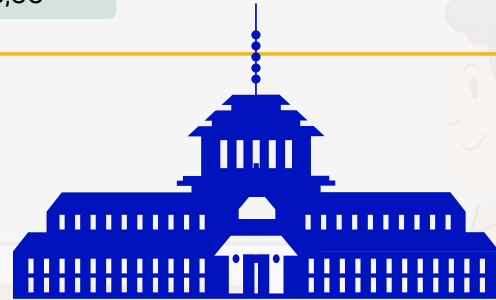
Target 2030	Capaian terhadap Renstra
Tinggi	100%

Perbandingan dengan rata-rata nasional

Tidak dapat diperbandingkan

Faktor-faktor yang Mendorong Keberhasilan

- Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi
- Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota
- Meningkatnya kualitas dukungan teknis dan administratif dalam persiapan penataan daerah dan penataan desa
- Meningkatnya kualitas layanan administrasi pemerintahan daerah



Rekomendasi penyesuaian target Tahun 2026

Realisasi 2025	Target 2026	Target Tetap
Tinggi	Tinggi	

Upaya perbaikan intervensi (continuous improvement)

- Penyusunan 1 Dokumen LPPD Provinsi
- Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil EPPD pada 31 PD Prov dan 27 kab/kota
- Pembinaan 10 calon daerah persiapan otonomi baru.
- Penyusunan 6 draft naskah kerjasama luar negeri
- Pembinaan kepada 27 kabupaten/kota dalam penguatan peran kecamatan

Program terkait:

Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Formulasi Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi

Merupakan indikator yang menggambarkan kategori kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan skor Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Kinerja diukur menggunakan formula: penjumlahan atas capaian kinerja makro, capaian kinerja urusan pemerintahan (dikali 75 persen), dan perubahan kinerja makro (dikali 25 persen)



E3ABAE3288

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>

Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk berhasil melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Hal ini ditandai oleh ditetapkannya indikator Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi yang kinerjanya mencapai 100%, dari target berkategori tinggi pada tahun 2025 terealisasi tinggi pada tahun 2026. Ketercapaian ini menggambarkan bahwa secara keseluruhan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mampu menyelenggarakan fungsi pemerintahan dengan baik dan efektif serta telah memenuhi sebagian besar indikator kinerja yang ditetapkan dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari segi realisasi, Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya yaitu Tahun 2024 berkategori tinggi dan pada tahun 2025 tetap berkategori tinggi. Hal ini dikarenakan penilaian dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali.

Begitu juga dengan aspek capaian, Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Tahun 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya yaitu Tahun 2024 berkategori tinggi dan pada tahun 2025 tetap berkategori tinggi. Hal ini dikarenakan indikator diukur setiap 2 (dua) tahun sekali.

Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, realisasi Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Tahun 2025 ini tetap data realisasi tahun 2021 dan 2022 berkategori Tinggi dan realisasi tahun 2025 berkategori Tinggi.

Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Tahun 2025 sudah berkategori tinggi terealisasi berkategori tinggi. Adapun pada level nasional, Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi tidak dapat dibandingkan karena indikator ini hanya diukur oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi antara lain:

- 1) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, yang ditandai dengan Persentase Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang Meningkat sebesar 42,11%. Realisasi ini mengandung makna bahwa semakin banyak indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat yang mengalami peningkatan capaian. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi didukung oleh



E3ABAE3288

pertama, persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sebesar 100% atau 31 perangkat daerah provinsi. Kedua, kategori pencapaian SPM Provinsi Jawa Barat “tuntas utama” sebesar 100% atau 6 perangkat daerah pengampu SPM. Ketiga, persentase rekomendasi penataan urusan pemerintahan provinsi yang ditindaklanjuti sebesar 100%.

2) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ditandai dengan Persentase Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang Mengalami Peningkatan Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebesar 100%. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh pertama, persentase kabupaten/kota di Jawa Barat dengan pencapaian SPM minimal kategori “tuntas utama” sebesar 100% Kedua, persentase rekomendasi penataan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten/kota sebesar 100% Ketiga, persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sebesar 100%. Keempat, persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja kecamatan sebesar 100%.

3) Meningkatnya Kualitas Dukungan Teknis dan Administratif dalam Persiapan Penataan Daerah dan Penataan Desa, yang ditandai dengan Persentase Dokumen Persiapan Penataan Daerah dan Penataan Desa sebesar 100%. Meningkatnya Kualitas Dukungan Teknis dan Administratif dalam Persiapan Penataan Daerah dan Penataan Desa didukung oleh pertama, persentase calon daerah persiapan otonomi baru yang meningkat nilai kapasitas daerahnya sebesar 22,22%. Kedua, persentase dokumen persiapan penataan daerah yang sesuai peraturan perundang-undangan sebesar 100%. Ketiga, persentase dokumen persiapan penataan desa yang sesuai peraturan perundang-undangan sebesar 100%.

3) Meningkatnya Kualitas Dukungan Teknis dan Administratif dalam Persiapan Penataan Daerah dan Penataan Desa, yang ditandai dengan Persentase Dokumen Persiapan Penataan Daerah dan Penataan Desa sebesar 100%. Meningkatnya Kualitas Dukungan Teknis dan Administratif dalam Persiapan Penataan Daerah dan Penataan Desa didukung oleh pertama, persentase calon daerah persiapan otonomi baru yang meningkat nilai kapasitas daerahnya sebesar 22,22%. Kedua, persentase dokumen persiapan penataan daerah yang sesuai peraturan perundang-undangan sebesar 100%. Ketiga, persentase dokumen persiapan



E3ABAE3288

penataan desa yang sesuai peraturan perundang-undangan sebesar 100%.

4) Meningkatnya Efektivitas Kerja Daerah, yang ditandai dengan Persentase Kerja Sama Daerah yang Efektif sebesar 100%. Meningkatnya Efektivitas Kerja Daerah didukung oleh pertama, persentase kerja sama dalam negeri yang terimplementasi sebesar 100%. Kedua, persentase kerja sama pihak ketiga yang terimplementasi sebesar 100%.

5) Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Internasional, yang ditandai dengan Persentase Kerja Sama Internasional yang Efektif sebesar 100%. Realisasi ini mengandung makna. Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Internasional didukung oleh persentase implementasi kerja sama internasional yang terimplementasi sebesar 30%..

6) Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Pemerintahan Daerah, yang ditandai dengan Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Daerah yang Sesuai Standar sebesar 100%. Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Pemerintahan Daerah didukung oleh pertama, persentase usulan penataan batas wilayah administrasi yang ditangani sesuai ketentuan sebesar 100%. Kedua, persentase usulan penataan batas wilayah administrasi yang ditangani sesuai ketentuan sebesar 100%. Ketiga, persentase pelayanan administrasi kepala daerah/wakil kepala daerah, DPRD baik provinsi maupun

kabupaten/kota sesuai standar terpenuhi sebesar 100%. Keempat, persentase permohonan penerbitan rekomendasi izin perjalanan dinas luar negeri bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, ASN, dan anggota DPRD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terlayani sesuai standar terpenuhi sebesar 100%.

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mencapai kinerja Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi melalui pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada 31 perangkat daerah Provinsi Jawa Barat, penyusunan 1 dokumen LKPJ Provinsi Jawa Barat, penyusunan 1 dokumen LPPD Provinsi Jawa Barat, penyusunan 1 dokumen penerapan SPM Provinsi Jawa Barat, pemantauan penerapan SPM pada 6 perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, penyusunan 1 dokumen rekomendasi hasil review urusan pemerintah daerah provinsi, pemantauan penerapan SPM pada 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, penyusunan 6 dokumen inventarisasi rincian urusan kabupaten/kota yang menjadi potensi daerah, penyusunan 1 laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota, pembinaan 27 kabupaten/kota dalam penguatan peran kecamatan, evaluasi kinerja 27 kecamatan yang ada di kabupaten/kota, penyusunan 1 dokumen rekomendasi hasil evaluasi



E3ABAE3288



**Rapat Batas Daerah Provinsi Jawa Barat- Provinsi Tengah Segmen
Kab. Cirebon-Kab. Berekbes**

kinerja kecamatan di kabupaten/kota, pembinaan 9 calon daerah persiapan otonomi baru dalam kapasitas daerah, pembinaan 1 kabupaten/kota dalam pembentukan daerah persiapan otonomi baru, penyusunan 1 kajian penataan daerah, pelayanan terhadap 100% usulan penataan daerah, penyusunan 1 dokumen kajian penataan desa, evaluasi kinerja 64 perangkat daerah dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan kerja sama, penyusunan 1 dokumen Grand Design kerjasama daerah 2025-2029, pelayanan terhadap 100% usulan penyusunan naskah kerjasama dalam negeri, evaluasi kerjasama dalam negeri dalam 12 dokumen, pemantauan implementasi 24 dokumen kerjasama dalam negeri, pelayanan terhadap 100% usulan penyusunan naskah kerjasama pihak ketiga, pemantauan 26 dokumen implementasi kerjasama pihak ketiga, evaluasi 24 dokumen kerjasama pihak ketiga, penyusunan 12 dokumen kajian kerjasama luar negeri, penyusunan 6

draft naskah kerjasama luar negeri, evaluasi kerjasama luar negeri dalam 4 dokumen, pemantauan implementasi kerjasama luar negeri dalam 12 dokumen, verifikasi usulan nama rupabumi, penyusunan 1 dokumen pemetaan data spasial tematik Provinsi Jawa Barat, penyusunan 1 dokumen pemetaan data rupabumi, pembinaan 10 kabupaten/kota dalam penyelenggaraan nama rupabumi, penyusunan 3 dokumen pendetailan segmen batas daerah Provinsi Jawa Barat, verifikasi usulan perubahan penegasan batas wilayah kabupaten/kota, pelayanan terhadap 100% permohonan administrasi kepala daerah/wakil kepala daerah dan DPRD baik provinsi maupun kabupaten kota, pelayanan terhadap 100% permohonan penerbitan rekomendasi izin perjalanan dinas luar negeri bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, ASN, anggota DPRD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.



E3ABAE3288

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>

Dalam rangka mengakselerasi kinerja Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi tahun 2026, maka perlu dilakukan perubahan target disertai dengan intervensinya. Namun demikian, pada tahun 2026, tidak perlu dilakukan perubahan target karena realisasi tahun 2025 berkategori tinggi tidak melampaui target tahun 2026 berkategori tinggi. Sehingga target Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi di tahun 2026 adalah tetap. Adapun upaya peningkatan kinerja yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi di Tahun 2026, antara lain:

1. Penyusunan 1 dokumen rekomendasi hasil review urusan pemerintah daerah provinsi
2. Penyusunan 1 dokumen LKPJ Provinsi Jawa Barat
3. Penyusunan 1 dokumen LPPD Provinsi Jawa Barat
4. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada 31 perangkat daerah Provinsi Jawa Barat
5. Pemantauan penerapan SPM pada 6 perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Barat
6. Penyusunan 1 dokumen penerapan standar SPM Provinsi Jawa Barat
7. Inventarisasi 1 dokumen rincian urusan kabupaten/kota yang menjadi potensi daerah
8. Pembinaan 27 kabupaten/kota dalam penguatan peran kecamatan
9. Penyusunan 1 dokumen rekomendasi hasil evaluasi kinerja kecamatan di kabupaten/kota
10. Evaluasi kinerja 27 kecamatan yang ada di kabupaten/kota.
11. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah di 27 kabupaten/kota
12. Evaluasi 1 laporan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota
13. Penyusunan 1 dokumen kajian penataan daerah
14. Pelayanan terhadap 100% usulan penataan desa
15. Penyusunan 1 dokumen kajian penataan desa
16. Pembinaan 10 calon daerah persiapan otonomi baru dalam kapasitas daerah
17. Pemantauan pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP di 10 perangkat daerah
18. Evaluasi 12 dokumen kerjasama dalam negeri
19. Pemantauan 12 dokumen implementasi kerjasama dalam negeri
20. Pelayanan terhadap 100% usulan penyusunan naskah kerjasama dalam negeri
21. Pemantauan 12 dokumen implementasi kerjasama pihak ketiga
22. Evaluasi 12 dokumen kerjasama pihak ketiga



E3ABAE3288

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>

23. Pelayanan terhadap 100% usulan penyusunan naskah kerjasama pihak ketiga
24. Penyusunan 6 draft naskah kerjasama luar negeri
25. Pemantauan 12 dokumen implementasi kerjasama luar negeri
26. Evaluasi 4 dokumen kerjasama luar negeri
27. Penyusunan 3 dokumen pendetailan segmen batas daerah Provinsi Jawa Barat
28. Verifikasi terhadap 100% usulan perubahan penegasan batas wilayah kabupaten/kota
29. Pelayanan terhadap 100% permohonan administrasi kepala daerah/wakil kepala daerah atau DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota
30. Pelayanan terhadap 100% permohonan penerbitan rekomendasi izin perjalanan dinas luar negeri bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, ASN, anggota DPRD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota
31. Verifikasi terhadap 100% usulan nama rupabumi

Program yang mendukung pencapaian Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi beserta faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilannya meliputi satu program yaitu Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Analisis mendalam dan rinci tentang program yang mendukung pencapaian Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Provinsi tergambar dalam faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan sebagaimana sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Efisiensi anggaran atas capaian sasaran strategis diatas sebesar 5,01% atau setara Rp499.566.829,66. Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp9.963.863.058,00,00 dan terealisasi sebesar Rp9.464.296.228,34

Berdasarkan pembahasan sasaran di atas, seluruh indikator kinerja tercapai. Indikator Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi berkategori tinggi. Oleh karena itu, kinerja dari sasaran Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi tercapai.

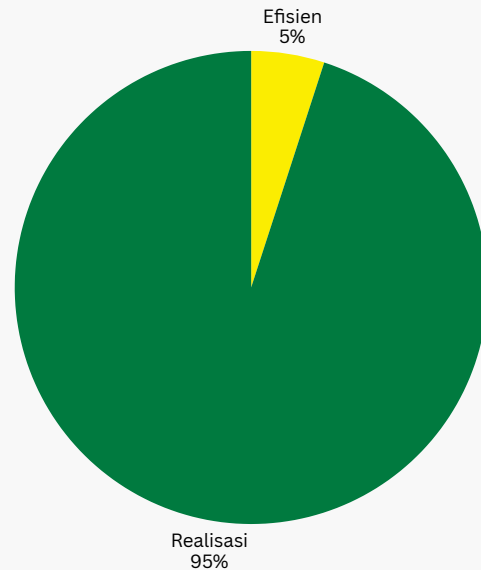


Realisasi Anggaran

Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 didukung oleh pelaksanaan program baik yang secara langsung berdampak terhadap pencapaian target kinerja maupun yang bersifat pendukung. Besaran anggaran yang digunakan untuk menunjang pencapaian sasaran kinerja adalah sebesar Rp692.416.877.171,00 dari rencana alokasi anggaran sebesar Rp732.327.656.442,00 sehingga kinerja anggaran tercapai sebesar 94,55% atau efisiensi sebesar Rp39.910.779.271 atau sebesar 5,45%. Secara komposisi, anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung program yang memiliki dampak langsung adalah sebesar Rp216.244.809.782,00 sementara untuk program penunjang adalah sebesar Rp476.172.067.389,00.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran strategis, pemanfaatan anggaran terbesar ada pada Sasaran 8 yaitu 'Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Jawa Barat' sebesar 65,45% dari total pemanfaatan anggaran atau sebesar Rp453.190.810.465,00 dan pada Sasaran 5 yaitu 'Meningkatnya Efektivitas Dukungan Kebijakan terhadap Pembangunan' sebesar 30,69% atau Rp212.477.596.862,66. Adapun pemanfaatan anggaran terendah ada pada Sasaran 2 Terkendalnya Stabilitas Harga Daerah Jawa Barat sebesar 0,016% atau Rp115.169.375,00.

Perbandingan Realiasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2025



Efisiensi anggaran didasarkan pada sasaran yang kinerjanya mencapai 100% dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap. Dari 12 sasaran, terdapat delapan sasaran dengan capaian kinerja melebihi target dengan tingkat efisiensi anggaran keseluruhan sebesar 1,12% atau Rp2.711.698.553,00. Secara rinci, data efisiensi anggaran per sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:



E3ABAE3288

Sasaran Strategis		Capaian Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih	Capaian Anggaran Kinerja	Efisiensi
SS1	Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pendidikan Tinggi	10,290%	8,180,000,000.00	8,060,000,000.00	120,000,000.00	98.53%	1.47%
SS2	Terkendalinya Stabilitas Harga Daerah Jawa Barat	13,079%	116,780,000.00	115,169,375.00	1,610,625.00	98.62%	1.38%
SS4	Regulasi Daerah Adaptif	10,780%	4,127,783,624.00	4,124,105,487.00	3,678,137.00	99.91%	0.09%
SS5	Meningkatnya Efektifitas Dukungan Kebijakan Terhadap Pembangunan	10,588%	214,340,719,792.00	212,477,596,862.66	1,863,122,929.34	99.13%	0.87%
SS6	Kinerja Perangkat Daerah Mencapai Target	14,428%	152,034,875.00	151,713,900.00	320,975.00	99.79%	0.21%
SS7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang Dan Jasa	10,903%	4,171,495,022.00	3,948,139,864.00	223,355,158.00	94.65%	5.35%
SS9	Kelembagaan Agile	10,000%	413,875,028.00	413,831,129.00	43,899.00	99.99%	0.01%
SS12	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	10,000%	9,963,863,058.00	9,464,296,228.34	499,566,829.66	94.99%	5.01%

Berdasarkan tabel di atas, analisis efisiensi per IKU sebagai berikut:

1) Sasaran 'Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pendidikan Tinggi' tercapai melalui kinerja 'Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi' sebesar 102,90% dengan efisiensi anggaran sebesar 1,47%;

2) Sasaran 'Terkendalinya Stabilitas Harga Daerah Jawa Barat' tercapai melalui kinerja 'Tingkat Inflasi' sebesar 130,79% dengan efisiensi anggaran sebesar 1,38%

3) Sasaran 'Regulasi Daerah Adaptif' tercapai melalui kinerja 'Indeks Reformasi Hukum' sebesar 107,80% dengan efisiensi anggaran sebesar 0,09%;

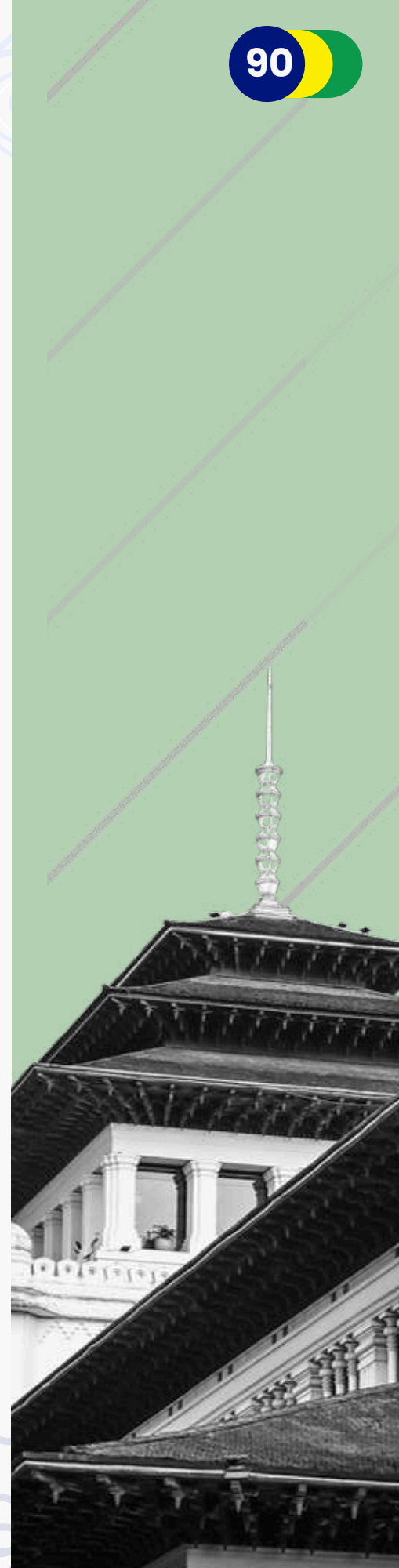


E3ABAE3288

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>

- 4) Sasaran 'Meningkatnya Efektivitas Dukungan Kebijakan terhadap Pembangunan' tercapai melalui kinerja 'Nilai Kualitas Kebijakan Daerah' sebesar 105,88% dengan efisiensi anggaran sebesar 0,87%;
- 5) Sasaran 'Kinerja Perangkat Daerah Mencapai Target' tercapai melalui kinerja 'Persentase Perangkat Daerah dengan Deviasi Kinerja $\geq 0\%$ ' sebesar 144,28% dengan efisiensi anggaran sebesar 0,21%;
- 6) Sasaran 'Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa' tercapai melalui kinerja 'Indeks Tata Kelola Pengadaan' sebesar 109,03% dengan efisiensi anggaran sebesar 5,35%;
- 7) Sasaran 'Kelembagaan Agile' tercapai melalui kinerja 'Nilai Evaluasi Kelembagaan' sebesar 100% dengan efisiensi anggaran sebesar 0,01%;
- 8) Sasaran 'Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah' tercapai melalui kinerja 'Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi' sebesar 100% dengan efisiensi anggaran sebesar 5,01%.



E3ABAE3288

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>

04

PENUTUP



E3ABAE3288

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2025. Dokumen ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi pada tahun berikutnya.

Secara umum, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2025 berhasil mencapai kinerja yang sangat baik dengan rata-rata capaian kinerja sebesar xx%. Dari 11 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan, sebanyak 9 indikator berhasil mencapai target, bahkan beberapa di antaranya melampaui target kinerja yang telah ditetapkan. Capaian tersebut didukung oleh komitmen organisasi yang kuat, pengembangan inovasi, penguatan kolaborasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan, serta pemanfaatan sumber daya organisasi secara optimal.

Meskipun demikian, masih terdapat 2 indikator kinerja yang belum mencapai target, yaitu Persentase BUMD Sehat dan Indeks Pelayanan Publik, yang dipengaruhi oleh dinamika .pengelolaan kinerja BUMD serta tantangan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Kondisi tersebut menjadi perhatian untuk terus dilakukan perbaikan melalui penguatan koordinasi, pembinaan, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan

Dengan capaian dan berbagai upaya perbaikan yang dilakukan, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan akuntabilitas organisasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, transparan, dan akuntabel dalam mendukung pembangunan Jawa Barat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.



E3ABAE3288

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>

Lampiran



E3ABAE3288

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Dr. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.**

Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : **DEDI MULYADI**

Jabatan : **GUBERNUR JAWA BARAT**

selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 28 November 2025

PIHAK KEDUA,
GUBERNUR JAWA BARAT

PIHAK KESATU,
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT



5F5BE49648

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5F5BE49648>



E3ABAE3288

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah dengan IRB Kategori A	89 Persen
2	Meningkatnya Efektivitas Dukungan Kebijakan terhadap Pembangunan	Nilai Kualitas Kebijakan Daerah	76,66 Poin
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tinggi (Kategori), 3,6855
4	Regulasi Daerah Adaptif	Indeks Reformasi Hukum	89,7 Poin
5	Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pendidikan Tinggi	Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	9,64 Persen
6	Terkendalinya Stabilitas Harga Daerah Jawa Barat	Tingkat Inflasi	3,3 - 3,8 Persen
7	Meningkatnya Kinerja BUMD	Persentase BUMD Sehat	78,37 Persen
8	Kinerja Perangkat Daerah Mencapai Target	Persentase Perangkat Daerah dengan Deviasi Kinerja => 0%	63,28 Persen
9	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	90,3 Poin
10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Jawa Barat	Indeks Pelayanan Publik	4,76 Poin
11	Kelembagaan Agile	Nilai Evaluasi Kelembagaan	68,45 Poin
12	Pelaporan Kinerja Pemda Berdampak pada Akselerasi Kinerja Pembangunan	Nilai SAKIP Pemda Dimensi Pelaporan	13,58 Poin



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5F18E43648>

5F58E43648



E3ABAE3288

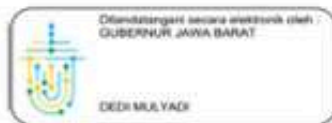
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>

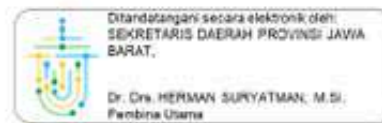


No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 513.865.963.922,-	APBD
2	Penataan Organisasi	Rp. 907.142.508,-	APBD
3	Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Rp. 7.579.733.785,-	APBD
4	Kesejahteraan Rakyat	Rp. 200.266.180.406,-	APBD
5	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp. 2.420.827.716,-	APBD
6	Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 4.792.172.784,-	APBD
7	Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 2.343.600.448,-	APBD
8	Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp. 152.034.875,-	APBD

GUBERNUR JAWA BARAT,



Bandung, 28 November 2025
 SEKRETARIS DAERAH
 PROVINSI JAWA BARAT,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/SFSBE49648>

SFSBE49648



E3ABAE3288

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>



Sasaran dan Indikator Kinerja Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2030

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pendidikan Tinggi	Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	9,64	9,75	9,86	9,97	10,08	10,20
2	Terkendalinya Stabilitas Harga Daerah Jawa Barat	Tingkat Inflasi	3,3 – 3,8	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5
3	Meningkatnya Kinerja BUMD	Persentase BUMD Sehat	78,37	81,08	83,78	86,48	89,18	91,89
4	Regulasi Daerah Adaptif	Indeks Reformasi Hukum	89,70	90,23	90,75	91,28	91,80	92,33
5	Meningkatnya Efektivitas Dukungan Kebijakan terhadap Pembangunan	Nilai Kualitas Kebijakan Daerah	76,66	77,43	78,20	78,98	79,77	80,57
6	Kinerja Perangkat Daerah Mencapai Target	Persentase Perangkat Daerah dengan Deviasi Kinerja $\geq 0\%$	63,28	63,51	63,75	64,98	64,22	64,45
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	90,30	90,31	90,32	90,33	90,34	90,35



E3ABAE3288



8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Jawa Barat	Indeks Pelayanan Publik	4,76	4,77	4,77	4,78	4,78	4,79
9	Kelembagaan Agile	Nilai Evaluasi Kelembagaan	68,450	73,093	73,093	73,093	79,598	79,598
10	Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah dengan IRB Kategori A	89	92	95	97	100	100
11	Pelaporan Kinerja Pemda Berdampak pada Akselerasi Kinerja Pembangunan	Nilai SAKIP Pemda Dimensi Pelaporan	13,58	13,61	13,65	13,68	13,71	13,74
12	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi



E3ABAE3288



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3ABAE3288>



E3ABAE3288